

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
IRIGASI SANREGO KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE**

TESIS

**MAPPASELING
4616103029**



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone
2. Nama Mahasiswa : **Mappaseling**
3. NIM : **4616103029**
4. Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Menyetujui,

Komisi Pembimbing:



Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S.

Ketua



Dr. Uddin B. Sore, S.Ip., S.H., M.Si.

Anggota

Mengetahui:

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si.
NIDN. 0913017402

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik



Prof. Dr. H. Andi Rasvid Pananrangi, SH., M.Pd.
NIP. 195601101983031002

HALAMAN PENERIMAAN

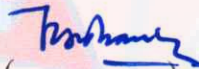
**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
IRIGASI SANREGO KECAMATAN KAHU
KABUPATEN BONE**

Pada Hari/Tanggal :
Tesis atas nama : Mappaseling
NIM : 4616103029

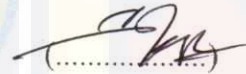
Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Administrasi Publik.

PANITIA UJIAN TESIS

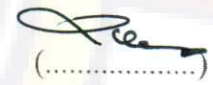
Ketua : Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S.


(.....)

Sekretaris : Dr. Uddin B. Sore, S.Ip., S>H., M.Si.


(.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si.


(.....)

2. Dr. Umar Congge, S.Sos., M.Si.


(.....)

Makassar,

2018



Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si.
NIDN. 0913017402

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,
Mahasiswa,

2018




MAPPASELING

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyajikan Tesis yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone" dapat terselesaikan tepat waktu.

Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan mengenai:

1) Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego; dan 2) faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Bosowa Prof. Dr. Ir. H M Saleh Pallu, M.Eng, yang telah memberikan fasilitas kepada kami untuk menyelesaikan tesis ini sampai dapat dipertahankan didepan dewan penguji.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Dr. Muhlis Ruslan, SE.,M.Si. dan Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si. yang selama ini telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ketua Komisi Pembimbing Prof. Dr. H. Husain Hamka, M.S. dan anggota Komisi Pembimbing Dr. Uddin B. Sore, S.Ip., S.H., M.Si. yang selalu memberikan dorongan dan koreksi-koreksi sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Bosowa Makassar yang selama ini telah mentransfer ilmunya dalam proses perkuliahan.

5. Seluruh informan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan informasinya di lokasi penelitian.

Sangat disadari bahwa dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki penulis, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun, agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

**Makassar,
Penulis**

2018

BOSO WA

MAPPASELING

ABSTRAK

Mappaseling. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. (Dibimbing oleh Husain Hamka dan Uddin B. Sore)

Permasalahan pada penelitian ini, didasari pada tujuan penelitian yang terdiri atas: Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dan Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan sesuatu.

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-kualitatif. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi pustaka, studi, observasi dan dokumen. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampel* (sampel bersyarat) yang mana informan tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan tema penelitian. Adapun informan ini terdiri atas kepala dinas, sekertaris dinas, kepala bagian, dan staf pengamat dan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini yakni: 1. Bentuk partisipasi petani yang terdiri atas Partisipasi (Harta Benda) dimana jika dilihat dari keaktifan masyarakat dalam menyumbangkan harta benda mereka, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi harta benda masyarakat terbilang aktif guna menjaga agar kondisi irigasi sanrego tetap baik dan Partisipasi Tenaga, dimana partisipasi masyarakat hanya terbatas pada perbaikan ringan saja misalnya membersihkan samapah dan membersihkan lumpur, sedangkan perbaikan dalam skala besar belum dapat dilakukan mengingat banyaknya jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan tidak sedikit. 2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yang terdiri atas: Faktor jenis kelamin. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Saat proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi terpaksa menggunakan sistem ganti-gantian yang kadang kala terdapat masyarakat yang malas untuk datang membantu dan Faktor umur. Jumlah penduduk yang lebih tua lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih muda. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan jaringan irigasi Sanrego.

Kata Kunci: Partisipasi, Pengelolaan, Irigasi

ABSTRACT

The problem in this research is based on the research objectives consisting of: Community participation in the irrigation management of Sanrego Kahu Subdistrict Bone District and the factors that hinder community participation in the irrigation management of Sanrego Kahu Subdistrict in Kabupaten Bone. Participation is an active process, meaning that the person or group involved, takes the initiative and uses his freedom to do something.

The research method used was descriptive-qualitative. Descriptive, because this research is intended to provide a detailed, systematic, factual and thorough description of everything that is examined. Data collection techniques are carried out with interviews, literature studies, studies, observations and documents. The informants in this study were determined by using purposive samples (conditional samples) in which we identified the informants according to the research theme. The informant consisted of the head of service, the official secretary of the department, the section head, and the observer staff and the community.

The results of this study are: 1. The form of farmer participation which consists of participation (property) which, when viewed from the activeness of the community in donating their property, it can be concluded that the participation of public property is active in order to keep sanrego irrigation conditions good and Energy Participation, where community participation is only limited to minor repairs, for example cleaning up and cleaning mud, while large-scale repairs have not been carried out considering the large amount of funds needed for repairs is not small. 2. Factors that hinder community participation in Sanrego irrigation management in Kahu Subdistrict, Bone Regency, which consists of: Gender factors. The population of men is less than women. When the process of maintaining and repairing the irrigation network is forced to use a change-change system, sometimes there are people who are lazy to come to help and age factors. The older population is more than the younger one. This certainly affects the level of community participation in the management of Sanrego irrigation networks.

Keywords: Participation, Management, Irrigation

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Konsep Partisipasi Masyarakat.....	8
B. Konsep Irigasi.....	24
C. Konsep Pelayanan Publik.....	33
D. Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP).....	37
E. Manajemen Kelembagaan.....	41
F. Kinerja Pelayanan Air.....	44
G. PERDA Kabupaten Bone Tahun 2009 Tentang Sistem Irigasi ...	46
H. Kerangka Konsep.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	51
D. Informan Penelitian	51
E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data	52
G. Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	56
B. Hasil Penelitian.....	62
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat	62
2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat....	70
C. Pembahasan Hasil Penelitian	72
1. Bentuk partisipasi masyarakat.....	72
2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat ..	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

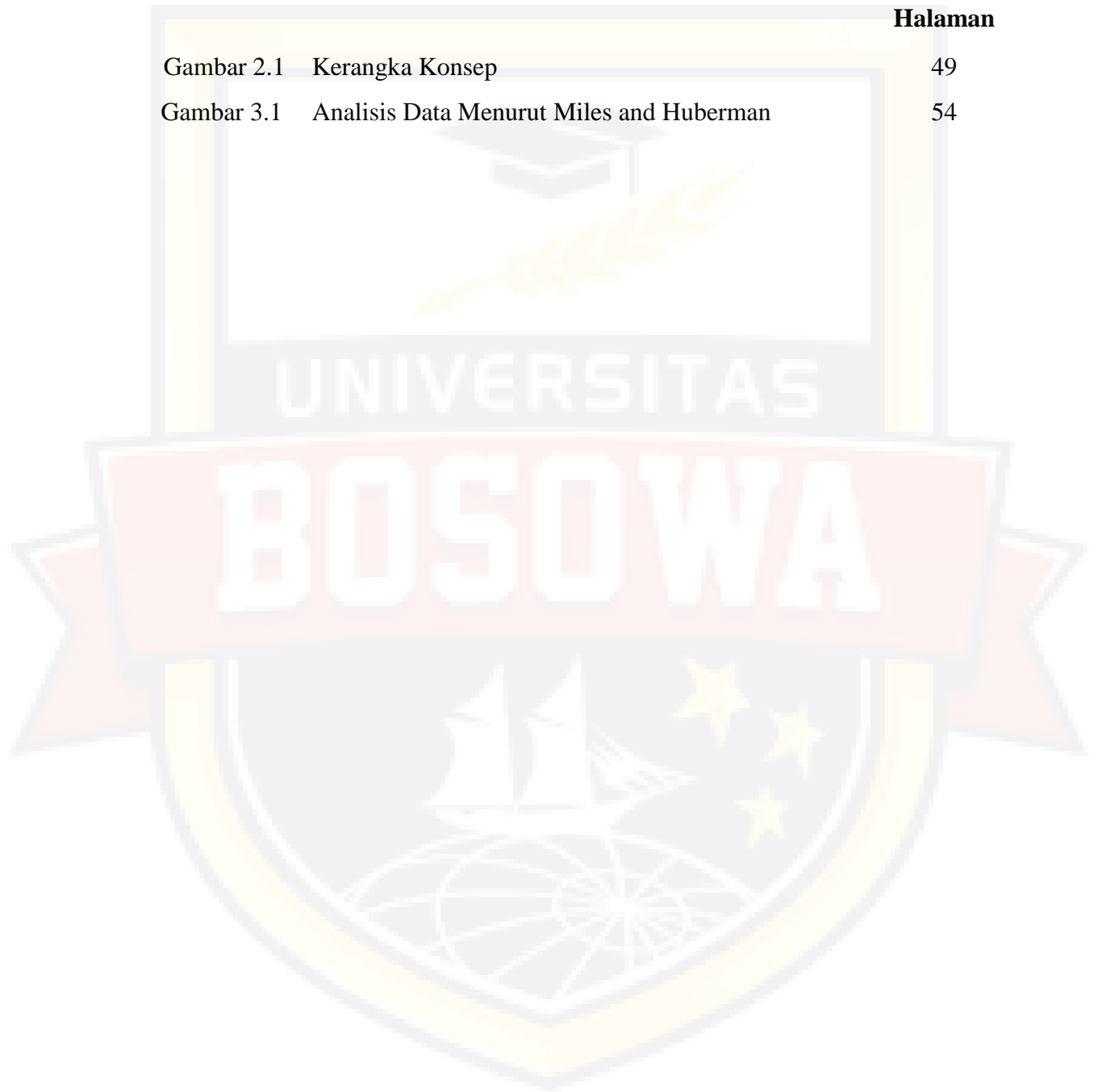
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	102
----------------------	------------

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konsep	49
Gambar 3.1 Analisis Data Menurut Miles and Huberman	54



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data	103
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari Instansi	104
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	104
Lampiran 4 Foto-Foto	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sentosa, baik itu berupa materiil ataupun spiritual sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara sebagai pemangku amanat didirikan demi kepentingan rakyat guna mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional tersebut serta dibentuklah suatu sistem hukum yang menjadi sarana utama untuk merealisasikan kehidupan yang teratur. Eksistensi sebuah Negara diharapkan dapat menjadi wadah bagi ketentraman hidup dalam mengelolah pembangunan yang merata di setiap elemen masyarakat. Untuk mewujudkan suatu masyarakat yang harmoni sesuai dengan hak dan kewajibannya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini dapat tercipta apabila didukung dengan sebuah sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada partisipasi masyarakat.

Otonomi daerah memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membangun daerahnya sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber lainnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Guna mencapai harapan tersebut diberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menggali kemampuan dan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Produk hukum ini

sekaligus mengubah paradigma pembangunan tersentralisasi (topdown) menjadi pembangunan berbasis pada partisipasi masyarakat (bottom-up).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 pasal 2 ayat 1, bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi. Demokrasi berarti mengutamakan musyawarah mufakat dalam proses pembangunan. Dengan adanya kesesuaian ini maka hasil pembangunan akan memberikan manfaat yang optimal bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu kebersamaan yang berkeadilan digunakan sebagai prinsip dasar dalam pembangunan nasional. Kendati demikian pedoman pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), masyarakat dapat berperan aktif untuk menyampaikan rencana pembangunan sesuai dengan kebutuhan mereka. Musrenbang yang dilaksanakan oleh pemerintah guna merumuskan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan. Undang-undang tersebut mengatur partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Namun kehadiran aturan tersebut tidak menutup kemungkinan hadirnya norma ataupun kaidah sosial dalam masyarakat yang merupakan akibat adanya gejolak sosial pada masyarakat.

Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dapat dipengaruhi oleh dua jenis aturan tersebut. Melalui asumsi tersebut maka partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dilihat melalui kajian sosiologi hukum. Salah satu wujud pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut adalah pembangunan irigasi. Program ini diperuntukkan agar masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilannya pada sektor pertanian.

Irigasi merupakan komponen penting bagi kegiatan pertanian di Indonesia yang sebagian besar berada di wilayah perdesaan. Indonesia adalah negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian dengan makanan pokoknya beras, sagu, dan ubi hasil produksi pertanian. Kebijakan pemerintah dalam pembangunan sangat diperlukan untuk mendukung sektor tersebut antara lain tentang pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani telah ditetapkan dalam 2 (dua) landasan hukum yaitu UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Untuk itu, diperlukan kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang kuat, mandiri, dan berdaya sehingga pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, dan pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam mendukung upaya peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

Irigasi menjadi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian dan merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada beras. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi pada ketentuan umum Bab I pasal 1 berbunyi:

“Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa, dan tambak. Untuk mengalirkan air sampai pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air.”

Menurut Mawardi dan Memed (2004) irigasi sebagai suatu cara mengambil air dari sumbernya guna keperluan pertanian, dengan mengalirkan dan

membagikan air secara teratur dalam usaha pemanfaatan air untuk mengairi tanaman. Pemanfaatan sumber daya air pada dasa warsa terakhir ini dirasa semakin bertambah besar, namun dibalik itu ketersediaan jumlahnya terbatas, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang selalu meningkat, keterbatasan air bagi pertanian bukan saja terjadi pada musim kemarau, namun di musim hujan pun bisa terjadi. Hal ini disebabkan sebagian besar air hujan yang jatuh menjadi aliran permukaan dan tidak dimanfaatkan sehingga ketersediaan air menjadi berkurang dalam skala ruang dan waktu.

Keterbatasan air menyebabkan berkurangnya luas tanam, jenis dan jumlah produksi pertanian. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan prioritas dan efisiensi penggunaan air. Efisiensi penggunaan air yang tinggi dalam hal ini irigasi dapat terlaksana apabila manajemen operasional yang ditetapkan tepat pada sasaran dan sarana jaringan irigasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya. Sarana yang dimaksud meliputi: saluran air, bangunan penangkap air, bangunan sadap, bangunan bagi, alat ukur debit dan bangunan-bangunan lainnya.

Bangunan ukur debit memegang peranan yang sangat penting dalam mendistribusikan air, sehingga diperoleh jumlah air yang diberikan akan sama jumlah air yang dibutuhkan. Apabila jumlah air yang diberikan lebih besar yang diminta, maka efisiensinya rendah sehingga penggunaan air boros, terbuang secara percuma. Demikian juga sebaliknya, jika jumlah air yang tidak mencukupi untuk kebutuhan tanaman pertanian akan berakibat produktivitas hasil pertanian menurun. Dengan demikian bangunan ukur debit harus tepat dalam memberikan jumlah air sesuai yang melalui kebijakan tentang pengelolaan sistem irigasi di

tingkat usaha tani yaitu UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi.

Partisipasi dan peran serta petani dalam pengelolaan irigasi dapat semakin ditingkatkan dan dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan hasil, dan pembiayaannya, sehingga petani mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab (*sense of belonging and sense of responsibility*) terhadap hasil pembangunan sarana dan prasarana irigasi tersebut. Dengan demikian, melalui pengelolaan irigasi diharapkan mampu menciptakan petani dan P3A yang kuat dan mandiri sekaligus menjadi penopang pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan (Nugroho, 2012).

Kecamatan Kahu merupakan salah satu kecamatan yang cukup besar di Kabupaten Bone dengan luas wilayah 114,20 km². Kecamatan yang memiliki 20 desa/kelurahan ini berpenduduk sebanyak 26.108 jiwa dengan potensi sumber daya unggulan berupa padi, rumput laut, kepiting dan kedelai. Sangat disayangkan ketika masyarakat apatis dan acuh terhadap sistem irigasi di daerah tersebut. Karena untuk mengembangkan potensi tersebut diperlukan adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah setempat dalam bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?.
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam evaluasi pengelolaan irigasi di Kabupaten Bone khususnya irigasi Sanrego.
 - b. Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai keikut sertaan masyarakat bersama dengan pengamat dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bone.

- c. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti terkait partisipasi masyarakat sebagai pengamat dalam pengelolaan sumber daya air.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat mengetahui bagaimana keikutsertaan masyarakat sebagai pengamat dalam pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Bone.
- b. Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di Kabupaten Bone dalam pengelolaan sumber daya air.

UNIVERSITAS
BOSOWA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Konsep Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi

Dari kajian literatur tentang partisipasi masyarakat di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa konsep partisipasi diinterpretasikan secara luas, seperti yang disampaikan Cohen dan Uphoff (1977), bahwa “Partisipasi dapat dilihat dari berbagai pandangan (*perspective*). Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam mengimplementasikan program serta menikmati keuntungan-keuntungan dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif, dimana rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka”.

Menurut FAO (Mikkelsen, 1999: 64), berbagai penafsiran yang berbeda dan sangat beragam mengenai arti kata tentang partisipasi yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.

- c. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak sosial.
- d. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Menurut Sastropetro (1988), definisi partisipasi yang dikutip dari beberapa ahli, sebagai berikut:

- a. Gordon Allport, menyatakan bahwa Partisipasi keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dari pada hanya jasmaniah/fisik saja.
- b. Keith Davis, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberi sumbangan kepada tujuan/cita-cita kelompok dan turut bertanggung jawab terhadapnya.
- c. Achmadi, menyatakan Partisipasi dalam bentuk swadaya gotongroyong merupakan modal utama. Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan.
- d. Santoso S. Hamidjoyo, menyatakan Partisipasi berarti turut memikul beban pembangunan, menerima kembali hasil pembangunan dan bertanggung jawab terhadapnya, dan terwujudnya kreativitas dan otonomitas.

- e. Alastraire White, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan komuniti setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan.
- f. Santoso Sastropetro, menyatakan Partisipasi adalah keterlibatan spontan dalam kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- g. Daryono, SH, menyatakan partisipasi berarti keterlibatan dalam Proses Pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, menentukan tujuan dari prioritas, dalam rangka mengeksplorasi sumber-sumber potensial dalam pembangunan.

Menurut Oakley (1991) mengartikan partisipasi kedalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.
- b. Partisipasi sebagai organisasi, meskipun diwarnai dengan perdebatan yang panjang di antara para praktisi dan teoritis mengenai organisasi sebagai instrumen yang fundamental bagi partisipasi, namun dapat dikemukakan bahwa perbedaan organisasi dan partisipasi terletak pada hakikat bentuk organisasional sebagai sarana bagi partisipasi, seperti organisasi-organisasi

yang biasa dibentuk atau organisasi yang muncul dan dibentuk sebagai hasil dari adanya proses partisipasi.

Dalam melaksanakan partisipasi masyarakat dapat melakukannya melalui beberapa dimensi, yaitu : a. Sumbangan pikiran (ide atau gagasan). b. Sumbangan materi (dana, barang, alat). c. Sumbangan tenaga (bekerja atau memberi kerja). d. Memanfaatkan/melaksanakan pelayanan pembangunan.

Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun sulit untuk didefinisikan, akan tetapi pemberdayaan merupakan upaya untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan.

Ndraha (1987) menyebut dua macam partisipasi, yaitu:

“partisipasi antar sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakannya partisipasi horizontal dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan, atau antar klien dengan patron atau antar masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama partisipasi vertikal”.

Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat, menurut Soetrisno (1995), yaitu:

“a. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam definisi ini pun diukur dengan kemauan rakyat ikut menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam melaksanakan pembangunan. b. Partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai”.

Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka. Ukuran lain yang dapat digunakan adalah ada tidaknya kemauan rakyat untuk secara mandiri melestarikan dan mengembangkan hasil proyek itu.

Menurut Adi (2001). Partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Tahap assesment. Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumber daya yang dimiliki. Untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif merasakan permasalahan yang sedang terjadi merupakan pandangan mereka sendiri.
- b. Tahap alternatif program atau kegiatan Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.
- c. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.
- d. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses dan hasil) Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

2. Bentuk dan Jenis Partisipasi

Masyarakat Menurut Davis (Sastropetro, 1988: 64), mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut, yaitu:

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa.
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang.
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu/instansi yang berada di luar lingkungan tertentu (dermawan, pihak ketiga).
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari, dan dibiayai seluruhnya oleh komuniti (biasanya diputuskan oleh rapat komuniti, antara lain, rapat desa yang menentukan anggarannya).
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, yang biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat.
- f. Aksi massa.
- g. Mengadakan pembangunan di kalangan keluarga desa sendiri.
- h. Membangun proyek komuniti yang bersifat otonom.

Davis (Sastropetro (1988: 65) juga mengemukakan jenis-jenis partisipasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pikiran (psychological participation).
- b. Tenaga (physical participation).
- c. Pikiran dan tenaga (psychological dan physical participation)
- d. Keahlian (participation with skill).
- e. Barang (material participation).

f. Uang (money participation).

Sherry R. Arnstein (Suryono, 2001: 115) memberikan model delapan anak tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on ladder of Citizen Participation). Hal ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat di sebuah negara. Dari model delapan anak tangga Arnstein maka akan sangat membantu untuk menganalisis perkembangan ataupun tingkat partisipasi masyarakat di suatu negara ataupun di suatu daerah.

3. Pentingnya Partisipasi Dalam Pembangunan

Oakley (1991: 34) berpendapat bahwa:

“Partisipasi merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhannya dan cara mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi dalam masyarakat”.

Menurut Moeljarto (1987: 30), partisipasi menjadi amat penting, terdapat beberapa alasan pembenar bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena:

- a. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- b. Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat.
- c. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan.
- d. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- e. Partisipasi memperluas zona (wawasan) penerima proyek pembangunan.
- f. Partisipasi akan

memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat. g. Partisipasi menopang pembangunan. h. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. i. Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. j. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri.

Menurut Tjokromidjoyo (1976: 22), ada empat aspek penting dalam rangka partisipasi pembangunan, yaitu:

- a. Terlibatnya dan ikut sertanya rakyat tersebut sesuai dengan mekanisme proses politik dalam suatu negara, turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
- b. Meningkatnya artikulasi (kemampuan) untuk merumuskan tujuantujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan itu yang sebaiknya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten dengan arah, strategi dan rencana yang telah ditentukan dalam proses politik.
- c. Adanya perumusan dan pelaksanaan program-program partisipatif dalam pembangunan yang berencana.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memungkinkan individu, kelompok serta masyarakat memperbaiki keadaan mereka sendiri, karena mereka sendirilah yang tahu akan apa yang menjadi kebutuhannya tersebut. Di samping juga mereka

merasa memiliki dan bertanggung jawab tentang apa yang telah mereka hasilkan dan apa yang telah dimanfaatkan tersebut. Hal ini terlihat dalam istilah “*bottom up planning*” (perencanaan dari bawah), keterlibatan pada “*grassroots*” (sampai pada masyarakat yang paling bawah), “*Democratic Planning*” (perencanaan demokratis) dan “*Participatory Planning*”.

4. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses:

- a. Pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat,
- b. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah,
- c. Pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan
- d. Keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap:

- a. Sosialisasi
- b. Perencanaan
- c. Pelaksanaan
- d. Pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (PTO PNPM PPK, 2007).

Pengertian lain tentang partisipasi masyarakat menurut Soemarto (2003) adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan

organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses: a. Perencanaan, b. Pelaksanaan dan c. Pemantauan kebijakan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Berdasarkan beberapa pengertian partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat langsung mulai dari:

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Monitoring sampai ke
- d. Tahap evaluasi yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Sekretariat Bina Desa (1999: 32-33) mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu:

- a. Partisipasi pasif/ manipulative, yakni:
 - 1) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi.
 - 2) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat;
 - 3) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- b. Partisipasi dengan cara memberikan informasi, yakni:
 - 1) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya;

2) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian;

3) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.

c. Partisipasi melalui konsultasi, yakni:

1) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;

2) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat;

3) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama;

4) Para profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

d. Partisipasi untuk

1) Masyarakat berpartisipasi dengan cara insentif materil menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya;

2) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya;

3) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.

e. Partisipasi fungsional

- 1) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek;
- 2) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati;
- 3) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.

f. Partisipasi interaktif

- 1) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada;
- 2) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis;
- 3) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.

g. *Self mobilization*

- 1) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki;

2) Masyarakat mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan;

3) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi. Maka di dalam penelitian ini partisipasi yang dimaksud oleh peneliti adalah partisipasi tenaga, dimana masyarakat atau petani berpartisipasi dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan kegiatan pengelolaan jaringan irigasi.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program. Faktor-faktor tersebut dapat mendukung keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya faktor usia, terbatasnya harta benda, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Angell (Ross, 1967: 130) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- a. Pendidikan. Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup

seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

- b. Pekerjaan dan Penghasilan. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
- c. Lamanya Tinggal. Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut Holil (1980: 9-10), unsur-unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- a. Kepercayaan diri masyarakat
- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat
- c. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat
- d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri

- e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat.
- f. Kepentingan umum murni, setidaknya-tidaknya umum dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum yang semu karena penunggangannya oleh kepentingan perseorangan atau sebagian kecil dari masyarakat.
- g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha.
- h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
- i. Kepekaan dan ketanggapan masyarakat terhadap masalah, kebutuhankebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil (1980: 10), ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

- a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam masyarakat dengan sistem di luarnya;
- b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat;

- c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial;
- d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau kelompok.

6. Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan Jaringan Irigasi.

Hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri dari faktor dari dalam masyarakat (internal) dan dari luar (eksternal). Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, dan penghasilan (Slamet, 1994: 97).

Sedangkan menurut Sunarti (2003: 9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Sunarti (Suryawan, 2004: 29), menjelaskan tentang hambatan-hambatan eksternal yang dapat ditemui dalam pelaksanaan partisipasi oleh masyarakat yang bersangkutan, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Kemiskinan. Hambatan ini dapat merupakan faktor yang mendasar karena dengan kemiskinan seseorang akan berpikir lebih banyak untuk melakukan

sesuatu yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi diri atau kelompoknya.

- b. Pola Masyarakat yang Heterogen. Hal tersebut akan mentidakibatkan timbulnya persaingan dan prasangka dalam sistem masyarakat yang ada;
- c. Sistem birokrasi. Faktor ini dapat dijumpai di lingkungan pemerintahan. seringkali birokrasi yang ada melampaui standar serta terpaku pada prosedur formal yang kompleks.

B. Konsep Irigasi

1. Pengertian Irigasi

Indonesia adalah Negara yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian dengan makanan pokoknya bersumber dari beras, sagu, serta ubi hasil pertanian. Jumlah penduduk Indonesia diprediksi akan menjadi 275 juta jiwa pada tahun 2025, maka untuk memenuhi produksi bahan makanan pokok berupa padi, sangat diperlukan jaringan irigasi. Irigasi pendukung keberhasilan pembangunan pertanian merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat strategis dalam pertumbuhan perekonomian nasional guna mempertahankan produksi swasembada beras. Saat ini sekitar 80 % dari produksi padi dalam negeri berasal dari sawah beririgasi, sementara program ketahanan pangan dapat terganggu dari banyaknya permasalahan yang menghambat kinerja dan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun dengan tingkat kerusakan jaringan irigasi setiap tahunnya mencapai 100.000 Ha dan pada tahun 2002 kerusakan mencapai 172.000 Ha (Soenarno, 2004).

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2006 tentang irigasi pada ketentuan umum bab I pasal 1 berbunyi irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya adalah irigasi permukaan, rawa, air bawah tanah, pompa dan tambak. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu dan bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.

Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, pembinaan dan pembuangannya. Jaringan utama adalah jaringan irigasi yang berada dalam satu sistem irigasi, mulai dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran sekunder, dan bangunan sadap serta pelengkap.

Petak irigasi adalah petak lahan yang memperoleh air irigasi. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air persatuan waktu dan saat pemberian air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam jaringan utama. Pemberian air irigasi adalah penyaluran alokasi air dan jaringan utama ke petak tersier dan kuarter.

Penggunaan air irigasi adalah pemanfaatan air di lahan pertanian. Untuk mengalirkan air pada areal persawahan diperlukan jaringan irigasi, dan air irigasi diperlukan untuk mengairi persawahan, oleh sebab itu kegiatan pertanian tidak dapat terlepas dari air. Irigasi sebagai suatu cara untuk mengambil air dari sumbernya guna keperluan pertanian, dengan mengalirkan dan membagikan air secara teratur dalam usaha pemanfaatan air untuk mengairi tanaman. Dalam meningkatkan produktivitas usaha tani diperlukan intensifikasi dengan pemanfaatan sumberdaya air guna melestarikan ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan petani. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan sumber daya air yang dapat dilakukan adalah melalui alokasi air irigasi secara efektif dan efisien.

Efisiensi dan efektivitas penggunaan air irigasi sangat dipengaruhi oleh perilaku para pemangku pengelola irigasi (institusi P3A) melalui pelayanan 3 (tiga) tepat; tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas yang dibutuhkan tanaman. Secara teknis pemberian air irigasi dan jumlah air yang harus diberikan sangat bergantung pada air yang dibutuhkan tanaman, ketersediaan air irigasi, namun kenyataan di lapangan waktu pemberian air irigasi masih dipengaruhi oleh kondisi fisik saluran irigasi, dan faktor perilaku para petugas di lapangan.

2. Pengelolaan Irigasi

Pengelolaan irigasi sebagai usaha pendayagunaan air irigasi yang meliputi operasi dan pemeliharaan, pengamanan, rehabilitasi, dan peningkatan irigasi. Pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air

sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.

Menurut Soenarno (2004) sektor sumber daya air dan irigasi menghadapi permasalahan investasi jangka panjang dan pengelolaan/ manajemen yang semakin kompleks dan menantang. Oleh karenanya tanpa penanganan yang efektif, hal-hal tersebut akan menjadi kendala bagi pengembangan perekonomian dan tercapainya ketahanan pangan nasional. Kerusakan jaringan irigasi di samping oleh faktor-faktor umur bangunan dan bencana alam, juga disebabkan oleh minimnya penyediaan dana operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Selain itu bias juga dipengaruhi oleh kuantitas dan kontinuitas pembagian air irigasi, karena saluran tidak terlewati air dapat terjadi kerusakan. Timbulnya kerusakan jaringan irigasi disebabkan beberapa faktor termasuk faktor alam dan perilaku masyarakat itu sendiri.

Menurut UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan PP nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi menjelaskan tentang pembagian kewenangan pengelolaan jaringan irigasi berdasarkan luasan areal persawahan yang dilayani oleh jaringan irigasi tersebut, yaitu; luas areal sampai dengan 1000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten, luas areal 1000 – 3000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, luas areal diatas 3000 Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan desentralisasi diberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan

prinsip pendekatan pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang termasuk irigasi.

3. Sistem Irigasi

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2006, pengertian irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Harsoyo dan Suhadi (1982) mengemukakan bahwa tujuan utama dari irigasi adalah membasahi tanah guna menciptakan keadaan lembab pada daerah perakaran untuk memenuhi kebutuhan air bagi tanaman. Dsi samping tujuan utama tersebut, tersedianya air irigasi akan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

- a. Mempermudah pengelolaan tanah sawah.
- b. Memberantas tumbuhan pengganggu.
- c. Mengatur suhu tanah dan tanaman.
- d. Memperbaiki kesuburan tanah.
- e. Membantu proses pencucian tanah (Supriyadi, 2008).

Sistem irigasi merupakan sistem saluran, yang dipergunakan untuk mendistribusikan air dari sumber berupa sungai, danau atau sumur bor (air tanah) ke unit-unit irigasi. Pada daerah irigasi yang kecil satu saluran saja mungkin sudah cukup. Pada daerah irigasi yang luas diperlukan sistem saluran yang lebih kompleks. Saluran biasanya dibuat dari timbunan tanah disekitarnya dan di lapisi dengan beton atau plastik (Ginting, 2014).

Sistem irigasi dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu : prasarana fisik, produktifitas tanam, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi, dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Bangunan irigasi mengalami penurunan fungsi akibat bertambahnya umur bangunan atau ulah manusia (Rahajeng, 2001).

4. Jaringan Irigasi

Berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 498 Tahun 2005 Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Rencana operasi jaringan irigasi merupakan rancangan upaya untuk memanfaatkan air dan jaringan irigasi secara optimal seperti pengaturan pintu-pintu pada bangunan air (bendung, bangunan, dll) untuk menyadap air dari sumber air, mengalirkan air kedalam jaringan irigasi, memasukkan air ke petak-petak sawah serta membuang kelebihan air ke saluran pembuang.

Jaringan irigasi berfungsi untuk mendistribusikan air dari sumbernya ke areal pertanian. Irigasi dimaksudkan untuk menjamin target produksi dapat dicapai dan penggunaan air sesuai dengan keperluan air tanaman dengan biaya operasi dan pemeliharaan minimal (Majuar, 2013). Dilihat dari segi konstruksi jaringan irigasinya, Direktorat Jendral pengairan mengklasifikasikan sistem irigasi menjadi tiga macam, yaitu: a) Irigasi sederhana, yaitu sistem irigasi yang konstruksinya dilakukan dengan sederhana, tidak dilengkapi dengan pintu pengaturan dan alat pengukur sehingga air irigasinya tidak dapat diatur dan tidak terukur, dan efisiensinya rendah. b) Irigasi setengah teknis, yaitu suatu sistem

irigasi dengan konstruksi pintu pengatur dan alat pengukur pada bangunan pengambilan saja, sehingga air hanya teratur dan terukur pada bangunan pengambilan saja dan efisiensinya sedang. c) Irigasi teknis, yaitu suatu sistem irigasi yang dilengkapi alat pengatur dan pengukur air pada bangunan pengambilan, bangunan bagi dan bangunan sadap sehingga air terukur dan teratur sampai bangunan bagi dan sadap, diharapkan efisiensinya tinggi (Supriyadi, 2008).

Saluran irigasi di daerah irigasi teknis dibedakan menjadi saluran irigasi pembawa dan saluran pembuang. Ditinjau dari jenis dan fungsinya saluran irigasi pembawa dapat dibedakan menjadi saluran primer, sekunder, tersier serta kuarter. Ditinjau dari letaknya, saluran irigasi pembawa dapat pula dibedakan menjadi saluran garis tinggi/kontur dan saluran garis punggung (Mawardi, 2007). Jaringan irigasi teknis mempunyai bangunan sadap yang permanen serta bangunan bagi mampu mengatur dan mengukur. Disamping itu terdapat pemisahan antara saluran pemberi dan pembuang. Pengaturan dan pengukuran dilakukan dari bangunan penyadap sampai ke petak tersier. Untuk memudahkan sistem pelayanan irigasi kepada lahan pertanian, disusun suatu organisasi petak yang terdiri dari petak primer, petak sekunder, petak tersier, petak kuarter dan petak sawah sebagai satuan terkecil. Pembagian air, eksploitasi dan perneliharaan di petak tersier menjadi tanggungjawab para petani yang mempunyai lahan di petak yang bersangkutan dibawah bimbingan pemerintah. Petak sekunder terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Biasanya petak sekunder menerima air dari bangunan bagi yang terletak di saluran primer atau sekunder. Batas-batas petak sekunder pada umumnya berupa tanda topografi yang jelas misalnya saluran drainase. Luas petak sekunder dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi topografi daerah yang bersangkutan. Petak primer terdiri dari beberapa petak sekunder yang mengambil langsung air dari saluran primer. Petak primer dilayani oleh satu saluran primer yang mengambil air langsung dari bangunan penyadap (Hariany, dkk., 2011).

5. Kinerja Sistem Irigasi

Kinerja jaringan irigasi adalah fungsi dari sejumlah variabel teknis, fisik, sosial dan ekonomi. Satu variabel indikator tidak dapat digunakan untuk mengukur semua aspek kinerja ataupun tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Indikator kinerja diperhitungkan berdasarkan aspek organisasi P3A, infrastruktur jaringan dengan sub indikator saluran pembawa, bangunan bagi/sadap dan jalan usaha tani, dan pengaturan air dengan sub indikator pendistribusian air, pengawasan penggunaan air dan pemeliharaan jaringan (Majuar, 2013).

Kinerja jaringan irigasi tercermin dari kemampuannya untuk mendukung ketersediaan air irigasi pada areal layanan irigasi (*command area*) yang kondusif untuk penerapan pola tanam yang direncanakan. Kinerja jaringan irigasi yang buruk mengakibatkan luas areal sawah yang irigasinya baik menjadi berkurang. Secara umum, kinerja jaringan irigasi yang buruk mengakibatkan meningkatnya *water stress* yang dialami tanaman (baik akibat kekurangan ataupun kelebihan air) sehingga pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman tidak optimal. Kerugian

yang timbul akibat *water stress* tidak hanya berupa produktivitas tanaman sangat menurun, tetapi mencakup pula mubazirnya sebagian masukan usaha tani yang telah diaplikasikan (pupuk, tenaga kerja, dan lain-lain). Perbaikan kinerja jaringan irigasi mencakup perangkat lunak maupun perangkat kerasnya. Secara normatif, monitoring dan evaluasi kinerja jaringan di level primer dan sekunder telah dilakukan oleh instansi terkait dan program rehabilitasinya telah pula dirumuskan (Sumaryanto, dkk., 2006).

6. Bangunan Irigasi dan Pelengkapannya

Sesuai dengan tujuan dari irigasi yaitu sebagai penyediaan dan pengaturan air guna menunjang pertanian, maka diperlukan suatu perangkat sarana dan prasarana untuk menunjang tujuan tersebut. Bangunan irigasi dan pelengkapannya adalah bangunan yang dibangun untuk menyediakan dan mengatur air, dalam hal ini termasuk diantaranya bendung, bendungan, bangunan pengambil/penyadap dari sungai. Kemudian untuk fungsi pengaturan diperlukan pelengkap seperti saluran irigasi, pintu bendung, bangunan bagi/bagi sadap, bangunan pembilas, pelimpah, bangunan ukur, dll.

Bangunan irigasi dan pelengkapannya merupakan satu kesatuan perangkat yang mutlak bekerja dengan baik agar fungsi dari sistem jaringan irigasi suatu daerah irigasi dapat bekerja sesuai dengan yang direncanakan, untuk itu diperlukan suatu perencanaan yang tepat, pengoperasian yang baik dan pemeliharaan yang teratur.

C. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan air irigasi merupakan bentuk pelayanan publik yang perlu upaya pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara demi kesejahteraan, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik (Sarjadi, 2009).

Pengelolaan jaringan irigasi yang diembankan kepada Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air merupakan suatu bentuk tanggung jawab dan penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui pembenahan sistem pelayanan publik secara menyeluruh dan terintegrasi. Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan dapat memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap

masyarakat. Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan (Waluyo, 2007).

Secara umum terdapat 4 (empat) unsur yang dapat memberi pengaruh terhadap peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan, yaitu :

1. Sumber daya yang bermutu.
2. Sistem dan teknologi terpadu.
3. Strategi yang tepat.
4. Logistik yang memadai.

Dalam konteks tercapainya pembentukan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dapat diukur dari kemampuannya melaksanakan urusan pemerintah daerah. Membentuk profesionalitas aparatur dapat melalui pendidikan formal maupun berbagai penyertaan dalam program pendidikan dan pelatihan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perlu lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas guna mengembangkan aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sehingga dapat memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dalam pelaksanaan tugas berdasarkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi serta tata nilai etik profesi.

Menurut Surjadi (2009), penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah mencakup penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah daerah dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) urusan, yaitu :

1. Urusan memberikan pelayanan kebutuhan/kepentingan masyarakat (*public interest*) maupun mengatasi masalah-masalah masyarakat (*public affair*).

Namun dalam hubungan ini tugas pokok pemerintah daerah tidak semata-mata melaksanakan pelayanan sesuai tuntutan/kebutuhan masyarakat, karena itu pendekatan dengan prinsip lebih baik pemerintah daerah sebagai pengemudi dari pada pendayung.

2. Urusan pemberdayaan masyarakat (*public energizing*), agar masyarakat mampu memenuhi kepentingan dan masalah-masalahnya dengan kekuatan sendiri. Dengan kemampuan masyarakat memenuhi kepentingan dan masalah-masalahnya sendiri akan membawa dampak meringankan beban pemerintah daerah, sekalipun pemerintah daerah berupaya meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan pelayanan dan urusan pemerintahan umum lainnya.
3. Urusan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kemampuan finansial sebagai karakteristik daerah otonom yang memiliki hak dan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri yang dibuktikan dengan kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan urusan-urusan daerah.
4. Urusan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur untuk kepentingan dan melindungi masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi yang di dasarkan pada kenyataan sebagai berikut :

1. Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi dan berfungsi sosial.
2. Terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional.
3. Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain
4. Makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Menurut Direktorat Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum (2002), reformasi kebijakan sumber daya air mencakup kebijakan irigasi dan kebijakan non-irigasi dengan 4 (empat) sasaran pokok, yaitu :

1. Perbaikan produk-produk peraturan perundang-undangan dan kerangka kelembagaan nasional dalam rangka desentralisasi pengembangan dan pengelolaan sumber daya air.
2. Perbaikan dan peningkatan kerangka kelembagaan sumber daya air di daerah dan wilayah sungai untuk pelaksanaan desentralisasi pengelolaan sumber daya air.
3. Perbaikan dan peningkatan institusi daerah (provinsi), kabupaten, dan wilayah sungai sebagai pengatur dan pelaksana pengelolaan/manajemen kualitas air di tingkat daerah.
4. Perbaikan dan peningkatan kebijakan nasional, institusi dan peraturan tentang pengelolaan irigasi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat (petani), pemakai air untuk mengelola jaringan irigasi.

D. Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan (TPOP)

Sesuai dengan Undang-undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Pembagian Wilayah Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat melakukan pengelolaan Daerah Irigasi melalui sumber dana APBN yang dalam pelaksanaannya ditugas pembantuankan kepada Pemerintah Provinsi. Agar pemberian air dapat dilakukan dengan adil dan berkesinambungan sesuai dengan keberadaan sumber air dan kebutuhannya maka mutlak diperlukan Operasi dan Pemeliharaan. Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan ini akan terdiri dari :

1. Administrasi Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan Tugas Pembantuan Operasi dan Pemeliharaan ini diperlukan pengadministrasian kegiatan sehingga setiap tahapan pelaksanaan dari pengusulan anggaran sampai dengan pelaksanaan berakhir akan dapat tercatat dengan baik dalam hal teknis maupun dalam hal keuangan. Dalam kegiatan pengadministrasian ini akan dilakukan penyusunan keperluan biaya operasi dan pemeliharaan tahun berikutnya, pelaporan, pengawasan dan monitoring pekerjaan baik pemeliharaan rutin maupun berkala, koordinasi dengan Pusat, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kabupaten / Kota, administrasi keuangan serta keperluan lainnya yang berhubungan dengan Operasi Pemeliharaan (OP).

Maksud dari kegiatan Administrasi ini adalah untuk melakukan pencatatan kegiatan baik teknis maupun keuangan sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat lebih terarah, berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sasaran kegiatan Administrasi ini adalah terpantaunya pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya.

2. Operasi Rutin

Operasi Rutin adalah suatu kegiatan yang diawali dari penentuan Pola Tata Tanam dan rencana pembagian air untuk memenuhi keperluan air pada setiap petakan-petakan tersier. Pelaksanaan pembagian air ini dilakukan secara terus-menerus oleh Pengamat dan dibantu oleh Juru Pengairan bekerja sama dengan Petani Pemakai Pengguna Air (P3A) / Gabungan Petani Pemakai Pengguna Air (GP3A). Dalam penentuan Pola Tata Tanam dan rencana pembagian air dilakukan secara berjenjang dari tingkat tersier yang dibuat oleh P3A beserta anggotanya (Petani) hingga ke tingkat Kabupaten dan akhirnya ditingkat Provinsi yang diwujudkan dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur. Sedangkan dalam pelaksanaannya Petugas-petugas OP yang berkoordinasi dengan GP3A / P3A. terus memantau penerapan Pola Tata Tanam dan terus memperhatikan ketersediaan air sehingga dapat diketahui kebutuhan dan ketersediaan air dalam setiap periodenya dan dapat membagi air dengan baik. Dalam kondisi-kondisi tertentu dimana ketersediaan air menurun (kebutuhan jauh lebih besar dari ketersediaan) maka Petugas OP akan melakukan penelusuran jaringan untuk dapat memastikan tidak adanya air yang terbuang dan mengatur kembali bukaan-bukaan pintu. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan/penurunan produksi panen.

Tujuan kegiatan Operasi Rutin ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya air dan lahan yang ada pada daerah irigasi sehingga air dapat dimanfaatkan

seoptimal mungkin demi untuk keperluan sawah. Sasaran kegiatan Operasi Rutin ini adalah untuk memperoleh pemberian dan pembagian air dengan baik sehingga sumber air yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mempertahankan dan meningkatkan produksi bahan pangan.

3. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan Rutin adalah upaya untuk mempertahankan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar tetap siap dalam mendistribusikan air irigasi sehingga pelayanan pemberian air kepada masyarakat tidak terhambat. Kerusakan-kerusakan kecil dan hal-hal lain yang dapat menghambat aliran air dan hal-hal yang dapat mengakibatkan kehilangan air akan diatasi pada kegiatan pemeliharaan rutin ini. Maksud dari kegiatan Pemeliharaan Rutin adalah mempertahankan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada dengan cara menghindari / membuang penghambat aliran sehingga saluran dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Tujuan kegiatan Pemeliharaan Rutin ini adalah untuk mempertahankan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar pendistribusian air irigasi tidak terhambat untuk menuju ke petak-petak tersier yang ada pada daerah irigasi. Sasaran kegiatan Pemeliharaan Rutin ini adalah agar saluran dan bangunan yang ada mampu mendistribusikan air irigasi menuju ke petak-petak tersier dengan baik sehingga sumber air yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mempertahankan dan meningkatkan produksi bahan pangan.

4. Pemeliharaan Berkala

Pemeliharaan Berkala adalah upaya untuk mempertahankan kondisi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar sarana tersebut dapat mendistribusikan air irigasi dengan baik dan berkelanjutan sehingga pelayanan pemberian air kepada masyarakat dapat lebih terjamin. Kerusakan-kerusakan yang ada pada saluran dan bangunan tersebut akan diperbaiki pada saat pengeringan, sehingga saluran kembali dalam kondisi semula.

Maksud dari kegiatan Pemeliharaan berkala adalah usaha mempertahankan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada dilakukan secara berkala. Tujuan kegiatan Pemeliharaan berkala ini adalah untuk mempertahankan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar pendistribusian air irigasi tidak terhambat untuk menuju kepetak-petak tersier yang ada serta memperpanjang usia pakai sarana irigasi yang ada. Sasaran kegiatan Pemeliharaan berkala ini adalah mempertahankan kondisi dan fungsi saluran dan bangunan irigasi yang ada agar mampu mendistribusikan air irigasi menuju ke petak-petak tersier dengan baik dan berkelanjutan sehingga sumber air yang ada dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin demi mempertahankan dan meningkatkan produksi bahan pangan.

5. Survey Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP)

Menjelang pengajuan anggaran biaya tahun yang akan datang, petugas dari masing-masing wilayah kerja akan melakukan penelusuran jaringan guna melihat kondisi kerusakan dan pemeliharaan riil di lapangan. Kerusakan-kerusakan dan operasional pemeliharaan tersebut didata kemudian dibuat perkiraan biaya yang

dibutuhkan berdasarkan kebutuhan yang terdata tersebut sehingga menghasilkan suatu nilai biaya yang akan diajukan sebagai anggaran tahun mendatang.

AKNOP adalah angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan untuk pengelolaan irigasi dari hasil inventarisasi penelusuran kerusakan jaringan irigasi yang ditetapkan melalui musyawarah. Komponen yang diperlukan dalam penyusunan AKNOP saat ini berdasarkan pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan besarnya tergantung dari jumlah bangunan dan panjang saluran irigasi yang dikelola dalam satu daerah irigasi. Komponen yang diperlukan dalam penyusunan AKNOP saat ini berdasarkan pembiayaan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan besarnya tergantung dari jumlah bangunan dan panjang saluran irigasi yang dikelola dalam satu daerah irigasi. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana jaringan irigasi yang mantap besarnya 1% - 2% dari nilai investasi biaya pembangunan jaringan irigasi setiap tahunnya.

E. Manajemen Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 32 Tahun 2007 Manajemen kelembagaan meliputi elemen-elemen yang terkait dalam kegiatan O & P sistem irigasi serta tugas yang dimilikinya.

1. Kepala ranting/pengamat/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/cabang dinas/korwil.
 - a. Mempersiapkan penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) sesuai usulan Perkumpulan

Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A).

- b. Rapat di kantor ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil setiap minggu untuk mengetahui permasalahan operasi, hadir para mantri/juru pengairan, Petugas Pintu Air (PPA), Petugas Operasi Bendung (POB) serta P3A/GP3A/IP3A. Menghadiri rapat di kecamatan dan Dinas PSDA kabupaten. Membina P3A/GP3A/IP3A untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan operasi.
 - c. Membantu proses pengajuan bantuan biaya operasi yang diajukan P3A/GP3A/IP3A.
 - d. Membuat laporan kegiatan operasi ke dinas.
2. Petugas mantri/juru pengairan
- a. Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil untuk tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi.
 - b. Melaksanakan instruksi dari ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil tentang pemberian air pada tiap bangunan pengatur.
 - c. Memberi instruksi kepada PPA untuk mengatur pintu air sesuai debit yang ditetapkan.
 - d. Memberi saran kepada petani tentang awal tanam & jenis tanaman.
 - e. Pengaturan giliran.
 - f. Mengisi papan operasi/eksploitasi.
 - g. Membuat laporan operasi.
 - h. Pengumpulan data debit.

- i. Pengumpulan data tanaman & kerusakan tanaman.
 - j. Pengumpulan data curah hujan (sesuai kebutuhan daerah).
 - k. Menyusun data mutasi baku sawah (sesuai kebutuhan daerah)
 - l. Mengumpulkan data usulan rencana tata tanam.
 - m. Melaporkan kejadian banjir kepada ranting/pengamat.
 - n. Melaporkan jika terjadi kekurangan air yang kritis kepada pengamat.
3. Staf ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil
 - a. Membantu kepala ranting/pengamat/UPTD/cabang dinas/korwil dalam pelaksanaan operasi jaringan irigasi.
 4. Petugas Operasi Bendung (POB)
 - a. Melaksanakan pengaturan pintu penguras bendung terhadap banjir yang datang.
 - b. Melaksanakan pengurasan kantong lumpur.
 - c. Membuka dan menutup pintu pengambilan utama, sesuai debit dan jadwal yang direncanakan.
 - d. Mencatat besarnya debit yang mengalir atau masuk ke saluran induk pada blangko operasi.
 - e. Mencatat elevasi muka air banjir.
 5. Petugas Pintu Air (PPA)
 - a. Membuka dan menutup pintu air sehingga debit air yang mengalir sesuai dengan perintah juru/mantri pengairan

F. Kinerja Pelayanan Air

Indikator kinerja pelayanan air meliputi : tingkat kecukupan air dan tingkat ketepatan pemberian air.

1. Tingkat kecukupan air

Masalah air bagi tanaman pangan tidak hanya didominasi oleh daerah beriklim kering. Di daerah beriklim basah air juga merupakan faktor pembatas terhadap tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman. Keberhasilan suatu kegiatan pertanian sangat ditentukan oleh perimbangan antara jumlah air yang tersedia di lahan dengan jumlah air yang dibutuhkan tanaman selama masa pertumbuhannya.

Jumlah air yang tersedia pada suatu lahan pertanian dapat dilihat dari kondisi curah hujan, sedangkan jumlah air yang dibutuhkan oleh tanaman dapat digambarkan dengan jumlah air yang dibutuhkan untuk evapotranspirasi. Jumlah air yang tersedia dan jumlah air yang dibutuhkan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, sehingga pada suatu periode dapat terjadi kelebihan air dan pada periode lainnya dapat terjadi kekurangan air bagi tanaman (Hidayat, dkk., 2006).

Tingkat kecukupan air ditandai dengan kemampuan suatu sumber air untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan tertentu. Pada areal beririgasi, lahan dapat ditanami padi 3 kali dalam setahun, tetapi pada sawah tadah hujan harus dilakukan pergiliran tanaman dengan palawija. Pergiliran tanaman ini juga dilakukan pada lahan beririgasi. Biasanya setelah satu tahun menanam padi, untuk meningkatkan produktivitas lahan, seringkali dilakukan tumpang sari dengan tanaman semusim lainnya, misalnya padi dengan jagung atau padi gogo di antara

ubi kayu dan kacang tanah. Pada pertanaman padi sawah, tanaman tumpang sari ditanam di pematang sawah, berupa kacang-kacangan (Prihatman, 2000).

2. Tingkat Ketepatan Pemberian Air

Dampak perubahan perilaku kekeringan memunculkan masalah dalam kegiatan pertanian, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan air tanaman. Data lapangan juga menunjukkan kekeringan agronomis tidak hanya terjadi pada lahan kering dan tadah hujan, tetapi juga melanda lahan sawah beririgasi, baik irigasi semiteknis maupun teknis. Sehingga kondisi ini memunculkan masalah baru pula terutama dalam hal ketepatan waktu pemberian air ke areal lahan. Penentuan kebutuhan air tanaman didasarkan pada jenis tanaman yang ada dan atau rencana tanam untuk masa yang akan datang. Sedangkan ketersediaan air didasarkan pada potensi air hujan, air sungai dan sumber air lainnya. Faktor kehilangan air, disamping untuk tanaman itu sendiri juga diperhitungkan kehilangan air karena perkolasi, evapotranspirasi serta efisiensi penyampaian atau penyaluran air dari sungai atau bendungan (Suprpto, dkk., 2008).

Rencana Pembagian Air (RPA) berdasarkan Keputusan Menteri PU No. 498 Tahun 2005 adalah rencana pemberian air pada setiap pintu ukur tersier dan pintu ukur pada bangunan bagi/pengontrol, selama 1 tahun, berdasarkan Rencana Tata Tanam yang telah disepakati oleh Lembaga Pengelola Irigasi yang berwenang. RPA akan memudahkan pelaksanaan pembagian air, terlebih untuk Daerah Irigasi Besar adalah mutlak dan sangat diperlukan. Jika debit sungai tersedia cukup dan petani melaksanakan tanam sesuai rencana (waktu dan luas), maka pemberian air adalah sesuai dengan RPA. Jika kemudian terjadi penyimpangan terhadap

Rencana Tata Tanam, misalnya : debit sungai mengecil (tak sesuai rencana), petani menanam di luar rencana. Tingkat ketepatan pemberian air erat kaitannya terhadap tingkat kecukupan air. Jika tingkat kecukupan air ditandai dengan kemampuan suatu sumber air untuk memenuhi kebutuhan air untuk keperluan tertentu, maka tingkat ketepatan pemberian air dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi untuk menyatakan kesesuaian waktu pemberian air sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

G. Perda Kab. Bone No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi

Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Sistem Irigasi mengatur tentang pembangunan dan pengelolaan irigasi. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, berkeadilan, dan akuntabel. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mengikutsertakan semua pihak terkait dan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani. Dalam Perda tersebut, Daerah Irigasi yang diatur ialah Daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 hektar.

Daerah irigasi di atas 3000 hektar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Daerah irigasi yang berada antara 1000-3000 hektar menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Sedangkan daerah irigasi di bawah 1000 hektar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat diatur dalam sistem kelembagaan yang berupa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). KPI meliputi SKPD yang membidangi irigasi, komisi irigasi, dan Perkumpulan Petani

Pemakai Air (P3A). Komisi Irigasi terdiri dari wakil pemerintah kabupaten, wakil P3A, dan wakil kelompok pengguna air irigasi.

Komisi Irigasi bertugas untuk: 1. Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi; 2. Merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi; 3. Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya; dan 4. Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi.

Daerah irigasi terbagi atas 3 tingkatan yaitu daerah irigasi primer, sekunder, dan tersier. Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah irigasi tersier. P3A dapat membentuk Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A) pada daerah irigasi sekunder, ataupun gabungan beberapa daerah irigasi sekunder. GP3A dapat membentuk induk P3A pada daerah irigasi primer, ataupun gabungan dari beberapa daerah irigasi primer.

Dalam pasal 15, hak dan tanggung jawab masyarakat petani dan atau P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai berikut: 1. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier. 2. Menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pemerintah Kabupaten mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk

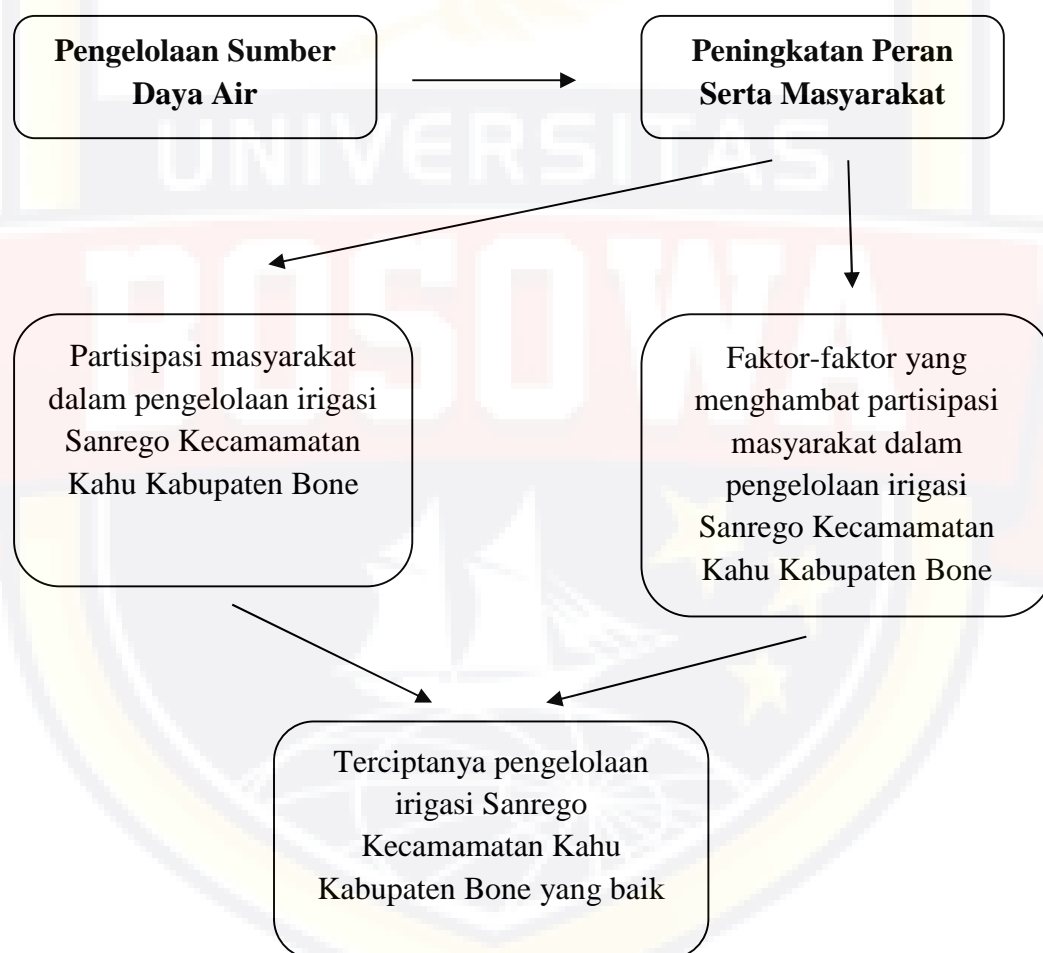
meningkatkan rasa memiliki, kebersamaan, dan tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi. Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.

Partisipasi masyarakat petani dilakukan melalui: 1. Perseorangan atau melalui P3A. 2. Sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana. 3. Kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian. Masyarakat petani berhak mengakses informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan informasi yang diperlukan.

H. Kerangka Konsep

Pemanfaatan sumber daya air pada dasa warsa terakhir ini dirasa semakin bertambah besar, namun dibalik itu ketersediaan jumlahnya terbatas, seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat yang selalu meningkat, keterbatasan air bagi pertanian bukan saja terjadi pada musim kemarau, namun di musim hujan pun bisa terjadi. Hal ini disebabkan sebagian besar air hujan yang jatuh menjadi aliran permukaan dan tidak dimanfaatkan, sehingga ketersediaan air menjadi berkurang dalam skala ruang dan waktu. Keterbatasan air menyebabkan berkurangnya luas tanam, jenis dan jumlah produksi pertanian maka dari itu, diperlukan Partisipasi dan peran serta petani dalam pengelolaan irigasi dapat semakin ditingkatkan dan dilakukan dalam setiap

tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan hasil, dan pembiayaannya, sehingga petani mempunyai rasa memiliki dan rasa tanggung jawab (*sense of belonging and sense of responsibility*) terhadap hasil pembangunan sarana dan prasarana irigasi khususnya di daerah irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Secara sederhana kerangka konsep pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-kualitatif. Bersifat deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang diteliti. Sedangkan analitis, berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna dan dalam penelitian ini analitis berarti mengelompokkan, menghubungkan dan memberi makna terhadap data yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego. Analisis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ditentukan oleh pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone. Pelaksanaan pada penelitian ini dijadwalkan dilakukan selama 3 bulan mulai dari penyusunan penelitian sampai dengan penyusunan laporan setelah penelitian.

C. Deskripsi Fokus dan Indikator Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting dalam penelitian kualitatif karena melalui fokus penelitian akan dapat membatasi studi yang diteliti. Fokus memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini akan dipahami masalah masalah yang menjadi tujuan penelitian. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti ini akan terjebak oleh melimpahnya volume data yang diperoleh di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi adalah wujud keikutsertaan masyarakat dalam upaya pengelolaan irigasi untuk kepentingan umum. Indikatornya adalah:
 - a. Partisipasi Uang
 - b. Partisipasi Tenaga
2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat kurang berminat dan berpartisipasi dalam upaya pengelolaan irigasi. Indikatornya adalah:
 - a. Jenis Kelamin,
 - b. Umur

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian kualitatif biasanya ditentukan dalam subjek dalam konteks sumber dayanya dengan menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* yaitu suatu pengambilan informasi yang dilandasi tujuan dan maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. Informan adalah pihak yang mengetahui secara pasti tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan irigasi Sanrego. Informan pada penelitian ini adalah pegawai pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone dan masyarakat yang terdiri atas:

1. Kepala dinas yang berjumlah 1 orang.
2. Sekertaris dinas yang berjumlah 1 orang
3. Staf pengamat daerah irigasi Sanrego yang berjumlah 3 orang.
4. Masyarakat Kecamatan Kahu yang berjumlah 3 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yang mencakup konsep pengembangan kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.
2. Data Sekunder, terdiri dari :
 - a. Hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian.
 - b. Kepustakaan, termasuk bahan dan hasil seminar dan konferensi-konferensi serta ulasan mass-media, termasuk ulasan dalam majalah hukum, majalah populer dan surat kabar) yang berkaitan dengan objek penelitian;
 - c. Bahan Tersier, yang terdiri dari: Ensiklopedi dan Kamus Pendukung lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara yang mendalam terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk

mendapatkan data primer sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan melalui penelusuran pada data-data atau membaca aturan-aturan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Alat Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

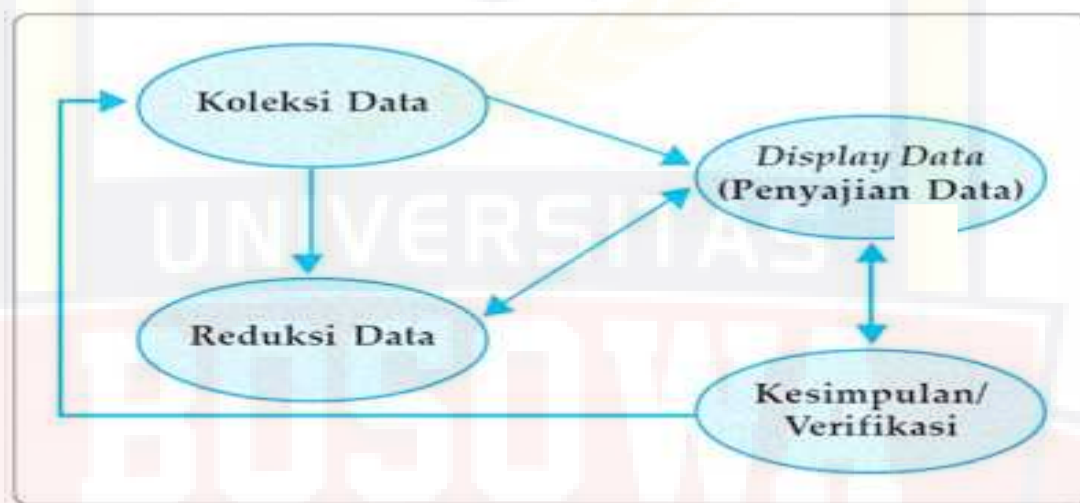
1. Studi kepustakaan/Normatif (*Library Studies*), yaitu mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian, termasuk penelitian normatif mengenai kelembagaan yang berhubungan dengan penelitian.
2. Studi Dokumen (*Documentary Studies*) dari bahan primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi:
 - a. Data terakhir mengenai permasalahan penelitian di daerah penelitian.
 - b. Daftar Pertanyaan baik yang terbuka maupun tertutup dan wawancara langsung dengan responden atas dasar *guide line* yang telah disiapkan sebelumnya.

G. Teknik Analisis Data Penelitian

Teknik yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu, analisis dilakukan setelah dikumpulkan data melalui wawancara dan observasi secara langsung di lapangan. Analisis data yaitu, proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data (Moleong, 2000 : 280).

Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984: 112) bahwa komponen analisis pada model interaktif yang bersifat fenomenologis,

terdiri dari (1) Pengumpulan data, (2) Reduksi, (3) Penyajian data dan (4) Penarikan kesimpulan. Selanjutnya analisis tersebut dilakukan dengan memadukan cara interaktif terhadap ketiga komponen utama dimaksud. Teknik analisis ini mengikuti langkah-langkah analisis yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.1. Teknik Analisis Data Model Interaktif (Miles & Huberman, 1984)

Pada tahapan pengumpulan data penelitian, data tentang bentuk etika birokrasi yang dikaitkan dengan indikator penelitian adalah (a) kebenaran (*truth*), (b) kebaikan (*goodness*), (c) keindahan (*beauty*), (d) kebebasan (*liberty*), (e) persamaan (*equality*), dan (f) keadilan (*justice*). Data yang dikumpulkan demikian banyak sehingga diperlukan untuk direduksi sesuai kebutuhan dan fokus penelitian.

Reduksi data dilakukan dengan pemilahan perhatian pada penyederhanaan, pengumpulan data yang terhimpun di lapangan, baik berupa data pengamatan, data wawancara dengan informan maupun data-data sekunder berupa

dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Reduksi data dilakukan selama pengumpulan data, ketika penelitian berlangsung dan ketika laporan hasil penelitian tersusun.

Proses selanjutnya adalah penyajian data. Data dikelompokkan berdasarkan fokus masalah penelitian yang kemudian disederhanakan dan dikonstruksi sedemikian rupa guna melengkapi interpretasi data. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah pengembangan interpretasi dan penarikan kesimpulan.

Setelah proses penyajian data, maka berikutnya adalah proses penarikan kesimpulan. Untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan dengan mencari pola hubungan, persamaan berbagai informasi yang berkenaan dengan fokus masalah. Pada awalnya dilakukan penarikan kesimpulan sementara dan kemudian dilakukan verifikasi memilah-milah data yang ada, dan jika perlu membuang data yang dianggap tidak terlalu penting; berdasarkan data-data yang ada yang selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir.

Hal tersebut diatas, sesuai dengan Miles dan Huberman (2007: 12) Teknik analisis data dalam penelitian ini, adalah model interaktif bersifat fenomenologis dengan menggunakan 4 (empat) komponen analisis dijelaskan sebagai berikut;

1. Reduksi data (*data reduction*) yaitu data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan tidak terkumpul dan terkelompok berdasarkan fokus dan indikator fokus, sehingga peneliti perlu melakukan reduksi data. Untuk itu peneliti membuat catatan dan matriks

untuk melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, serta menyusun sesuai dengan tema dan polanya;

2. Penyajian data (*data display*) yaitu menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif sehingga mudah dipahami; berdasarkan data yang telah di reduksi dan jika dibutuhkan akan disertakan dengan skema atau gambar yang mendukung penyajian data.
3. Verifikasi yaitu peneliti setelah mereduksi dan mendisplay data akan meverivikasi data yang tiak diperlukan atau tidak berhubungan dengan fokus yang diteliti;
4. Melakukan triangulasi (*triangulation*) yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
5. *Member chek* yaitu pengecekan secara berulang-ulang terhadap data yang diperoleh;
6. Penarikan kesimpulan data yaitu dengan cara menyimpulkan data dan selanjutnya menarik kesimpulan serinci mungkin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar mempunyai garis pantai sepanjang 138 km dari arah Selatan ke arah utara. Secara astronomis terletak pada posisi 4.130 - 15.060 Lintang Selatan dan antara 119.42°-120.40° Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Soppeng
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sinjai dan Gowa
3. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru

Kabupaten Bone terdiri dari 27 kecamatan yang diperinci menjadi 333 desa dan 39 kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 888 dan lingkungan sebanyak 121. Jumlah penduduk seluruhnya adalah 699.474 jiwa pada tahun 2017.

Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan seperti program Keluarga Berencana yang terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mengukur kegiatan

ekonomi penduduk. TPAK merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. TPAK penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Bone pada tahun 2017 tercatat 5.860 pegawai.

Dilihat dari lapangan usaha sebagian besar penduduk Kabupaten Bone bekerja di sektor pertanian yang berjumlah 375.548 jiwa (66,03 persen) dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor lain yang juga banyak menguras tenaga kerja adalah sektor jasa (18,37 persen) dan perdagangan, hotel dan restoran (12,92 persen). Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Karena itu sarana dan prasarana pendidikan harus tersedia.

Aspek kesehatan merupakan bagian yang terpenting pula diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Pembangunan kesehatan di Kabupaten Bone diharapkan agar pelayanan kesehatan meningkat lebih luas, lebih merata terjangkau oleh lapisan masyarakat. Penyediaan sarana pelayanan kesehatan berupa rumah sakit sebanyak dua buah, puskesmas sebanyak tiga puluh enam buah, puskesmas pembantu sebanyak enam puluh lima buah dan posyandu sebanyak sembilan ratus lima belas buah.

Sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan produktivitas dan kualitas tanaman pangan. Pembangunan pertanian, khususnya tanaman pangan, diarahkan

untuk meningkatkan produksi palawija dan hortikultura. Peningkatan produksi padi dilakukan melalui program dalam bentuk Insus dan Inmum serta ditunjang dengan pencetakan sawah baru dan peralatan yang memadai. Secara umum perekonomian daerah Kabupaten Bone di dominasi sektor pertanian khususnya di sektor pertanian tanaman pangan. Selanjutnya, adalah sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, dan sub sektor perikanan.

Luas panen tanaman padi di Kabupaten Bone akhir tahun 2017 sebesar 117.066 ha. Produksinya tercatat 658.441 ton gabah kering giling atau rata-rata produksi 5.62 ton/ha. Luas panen tanaman palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai dan kacang hijau) pada tahun 2007 seluas 61.796 ha dengan jumlah produksi tercatat 215.783 ton. Usaha pokok yang ditempuh dalam pembangunan tanaman perkebunan adalah intensifikasi, rehabilitasi dan extensifikasi tanaman di perkebunan Kabupaten Bone termasuk banyak. Namun yang termasuk dalam komoditi andalan tahun 2017 adalah antara lain kakao 12.870 ton, kelapa 11.667 ton, tebu 25.710 ton, kemiri 6.890 ton dan cengkeh 2.087 ton.

Hutan sebagai sumber daya alam merupakan modal kekayaan bangsa yang mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena hutan juga berfungsi sebagai daerah penyanggah terutama sangat berperan dalam menjaga kelestarian air dan lingkungan hidup. Dengan demikian hutan perlu dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk kemakmuran rakyat sekaligus dijaga kelestariannya, dengan melakukan usaha seperti reboisasi dan penghijauan bagi hutan/tanah yang nampak mulai gundul

pada tahun 2017 luas areal reboisasi 2.100 ha sedangkan luas areal penghijauan 1.150 ha.

Sumber protein yang utama bagi manusia berasal dari protein hewan termasuk ikan. Keberhasilan sub sektor peternakan dapat dilihat melalui indikator naik turunnya populasi ternak dan unggas. Populasi ternak besar di Kabupaten Bone selama kurun waktu tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yaitu: populasi ternak besar (sapi, kerbau, kuda, kambing) pada tahun 2006 tercatat 156.433 ekor naik menjadi 164.006 ekor pada tahun 2007 atau naik sekitar 4,84 persen. Ternak unggas (ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras dan itik) pada tahun 2006 populasinya sebesar 1.538.672 ekor turun menjadi 1.001.074 ekor pada tahun 2007 atau turun sekitar 34,94 persen.

Kabupaten Bone terletak dipinggir pantai yang berpotensi terhadap sub sektor perikanan, khususnya penangkapan ikan di laut. Pada sub sektor perikanan laut jumlah perahu motor dan perahu tanpa motor penangkap ikan pada tahun 2017 masing-masing tercatat 600 buah dan 2.551 buah. Untuk sub sektor perikanan darat, menurut jenis pemeliharaan, meliputi tambak dan kolam masing-masing luasnya tercatat sebesar 15.244 ha dan 1.970 ha.

Sumbangan sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bone adalah sebesar 8,28 persen. Angka ini lebih rendah di banding tahun 2006 yang mencapai 8,36 persen. Jumlah unit usaha sektor industri pengolahan di Kabupaten Bone tahun 2012 tercatat 4.945 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 5.421. Adapun jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri pengolahan pada tahun 2012 sebanyak 15.906 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 17.718 orang.

Peningkatan jumlah unit usaha dan jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan ini akibat dari adanya kemudahan–kemudahan dalam proses industri dan tersedianya sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memacu sektor industri agar lebih efisien dan mampu bersaing pada pangsa pasar. Potensi pertambangan di Kabupaten Bone cukup besar dan terdiri dari emas, batu bara, pasir silika, tembaga mangan, endapan besi, batu gamping, marmer, pasir kuarsa, dan lain-lain. Namun sampai saat ini masih dalam tahap penjajakan (survei) dan belum ada yang diolah.

Pekembangan sarana dan prasarana perhubungan baik langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh pada perkembangan kehidupan sosial ekonomi suatu wilayah demikian juga sebaliknya. Hal itu menjadi sesuatu yang penting terutama daerah yang cukup luas dengan sumber daya yang beragam seperti halnya Kabupaten Bone.

Pada tahun 2017 PAD Kabupaten Bone mencapai 34,59 miliar rupiah atau meningkat 63,65 persen dibanding tahun 2016. Kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 3.67 persen sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 5.2 persen. Penyumbang PAD terbesar adalah retribusi daerah yang mencapai 44.62 persen. Kondisi perekonomian suatu daerah/wilayah sangat tergantung pada potensi dan sumber daya alam yang dimiliki dan kemampuan daerah itu untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

Semua upaya dan kebijaksanaan pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang mengembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2017 telah mencapai Rp. 4.423,74 miliar. Jika dibanding dengan nilai PDRB tahun 2016 sebesar Rp. 3.680,83 miliar maka terjadi kenaikan sebesar 14,58 persen. Salah satu manfaat hasil perhitungan PDRB yaitu dapat digunakan untuk melihat gambaran struktur perekonomian suatu daerah atau wilayah. Struktur perekonomian di dominasi oleh sektor pertanian. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan total PDRB tahun 2017 sebesar 54,34 persen urutan kedua sektor-sektor jasa sebesar 12,40 persen disusul sektor industri pengolahan 8,28 persen dan sektor perdagangan restouran dan hotel 7,41 persen dan sektor lainya sebesar 17,58 persen.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah adalah PDRB perkapita. PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bone dari tahun 2014 sampai tahun 2017 telah berkembang sangat pesat. Pada tahun 2014 PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bone mencapai Rp. 4.336.948 dan pada tahun 2017 telah meningkat menjadi Rp. 6.324.386

B. Temuan Penelitian

1. Bentuk partisipasi masyarakat

Menurut Oakley (1991) mengartikan partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk

kontribusi lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan proyek pembangunan.

Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua yakni:

a. Partisipasi Harta Benda

Menurut Holil (1980: 81), Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas untuk kelancaran suatu usaha dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menjelaskan:

“masyarakat yang berada dekat dengan kawasan irigasi sanrego, biasanya meminjamkan alat pertukangan mereka, misalnya palu dan gergaji pada saat perbaikan lokasi irigasi, kadang kala mereka juga menyumbangkan makan dan minum untuk para pekerja saat ada proses perbaikan” (tanggal wawancara 3 Agustus 2018).

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Budiman, menyatakan:

“masyarakat disini sangat antusias kalo ada perbaikan jaringan irigasi, biasanya mereka memperbaiki sendiri jika ada kerusakan ringan, mereka akan membawa alat masing-masing dari rumah dan melakukan perbaikan jaringan irigasi, ini mereka lakukan agar jaringan irigasi tetap terjaga fungsinya”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu warga atas nama Maliki yang menyatakan:

“biasanya tho kak, kalo ada kerusakan lahan irigasi, biasanya langsungki pergi ambil alat masing-masing di rumah baru secara gotong royong maki

perbaiki irigasi yang rusak, kalo tidak begituki nanti rusak parahki baruki menyesal”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Salah satu warga atas nama Maryuni menambahkan:

“kalo ada rusak di irigasi, cepatki para laki-laki perbaiki sedangkan kita perempuan menyediakan makan dan minum ala kadarnya, biar para pekerja tidak kehausan dan kelaparan setelah na perbaiki anu yang rusak”. (Tanggal wawancara, 2 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas, sejalan dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dimana pada saat terjadi kerusakan di sekitar lahan irigasi, maka masyarakat secara sukarela melakukan perbaikan yang sifatnya ringan, misalnya membersihkan pinggiran irigasi dan mencari lokasi penyumbatan jika debit air yang mengalir tidak sesuai dengan perkiraan. Jika dilihat dari keaktifan masyarakat dalam menyumbangkan harta benda mereka, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi harta benda masyarakat terbilang aktif guna menjaga agar kondisi irigasi sanrego tetap baik.

b. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006 tentang Irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.

Jaringan irigasi dapat cepat rusak karena adanya hujan/air, sengatan sinar dan panas matahari secara langsung, hewan/manusia, tanaman liar atau karena rancangan dan konstruksi fasilitas dan jaringan yang kurang baik, sehingga:

- 1) Sinar matahari yang panas akan mengakibatkan keretakan yang memudahkan badan saluran terkikis;
- 2) Hujan lebat akan menekankan dan menerpa badan bangunan sehingga mudah tergerus dan tererosi;
- 3) Air yang mengalir deras melebihi kecepatan rencana, akan mengikis badan saluran sehingga proses penggerusan dan erosi akan terjadi sangat mudah;
- 4) Keberadaan hewan yang dilepas secara liar di sekitar bangunan dan fasilitas irigasi akan dapat merusak fasilitas tersebut apabila tidak ditangani secara baik;
- 5) Bagian dari tanaman liar (daun, batang, akar) akan mengganggu kelancaran pengaliran air;
- 6) Ukuran, letak, spesifikasi dan kualitas bangunan yang tidak tepat akan berpengaruh negatif terhadap pemeliharaan jaringan;
- 7) Sementara itu, perbuatan manusia yang seringkali kurang sadar dan kurang memahami pentingnya upaya pembagian air, dengan sendirinya akan banyak berpengaruh terhadap tidak efektifnya fungsi jaringan irigasi.

Untuk menjaga agar kondisi irigasi tetap baik, diperlukan partisipasi tenaga oleh masyarakat, guna membantu pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menjelaskan:

“tugas perbaikan saluran irigasi adalah salah satu tugas dari dinas kami, namun karena banyaknya kegiatan maka kadang kala masyarakat memabtu kami dalam proses pengamanan jaringan irigasi” (tanggal wawancara 3 Agustus 2018).

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Wahyuddin, menyatakan:

“kami selaku aparat dan pengelola jaringan irigasi biasanya melakukan pengamanan jalur irigasi guna menjaga agar saluran irigasi tidak terganggu. Tindakan yang kami lakukan biasanya memasang tanda larangan membuang sampah dan memasang portal yang menuju ke jaluran irigasi agar kendaraan berat tidak memasuki kawasan irigasi. Ini kami maksudkan agar kondisi saluran irigasi tetap aman”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu warga atas nama Mansyur yang menyatakan:

“kalo pengamanan jalur irigasi, dari pihak pemerintah sudah adami, banyak tanda larangan na pasang di sepanjang jalur irigasi”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas sejalan dengan Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006, tentang Irigasi, pasal 59 menyebutkan bahwa pengamanan jaringan bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia atau daya rusak alam. Jaringan irigasi (antara lain bangunan sadap, bangunan ukur, bangunan bagi, saluran dan sebagainya) perlu diamankan agar fungsi dan kondisinya dapat terus terjaga. Kondisi fisik jaringan irigasi yang baik belum tentu fungsinya juga baik, demikian juga sebaliknya fungsinya bisa berlangsung secara baik meskipun kondisi fisiknya hanya berupa jaringan dan bangunan yang sederhana saja.

Untuk menjaga jaringan irigasi tersebut, maka perlu dilakukan usaha-usaha pengamanan, yang tidak saja dilakukan oleh petugas Pemerintah namun

juga harus dilakukan oleh petani pemakai air. Untuk dapat melakukan pengamanan jaringan irigasi yang memadai secara fisik maupun fungsinya, perlu diketahui hal-hal yang harus dihindarkan yang berkaitan dengan jaringan irigasi tersebut. Hal-hal tersebut perlu dihindarkan karena secara teknis akan berpengaruh terhadap kemampuan jaringan sedemikian rupa untuk mampu secara efisien menyalurkan air ke petak-petak sawah. Namun demikian, apabila masyarakat tani dengan secara dialogis sepakat bahwa hal tersebut tidak perlu dilarang dengan resiko yang ada, maka hal tersebut dengan sendirinya dapat dibenarkan secara intern dilingkungan mereka. Konsekuensi terhadap pelanggaran terhadap hal-hal yang seharusnya dapat dihindari tapi masih dilakukan oleh beberapa petani, akan mengakibatkan permasalahan yang berbuntut perselisihan, baik antar anggota P3A atau antar P3A dengan organisasi lain yang setidaknya memerlukan upaya dan waktu untuk mengatasinya. Termasuk kegiatan pencegahan antara lain: 1) Menetapkan garis sepadan . 2) Memasang tanda larangan membuang sampah di saluran/bangunan. 3) Memasang portal pada jalan inspeksi, untuk mencegah kendaraan berat roda 4 masuk jalan inspeksi.

Selain melakukan pengamanan terhadap jalur irigasi, bentuk partisipasi tenaga dilakukan juga dengan melakukan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan pemeliharaan darurat. Pemeliharaan rutin adalah kegiatan perawatan pada jaringan irigasi yang biasanya dilaksanakan setiap tahun seperti : 1) Membersihkan sampah, lumpur dan pintu air; 2) Memotong rumput dan tumbuhan pengganggu di sepanjang saluran; 3) Mengoptimalkan penampang saluran; 4) Menutup bocoran kecil; 5) Memberikan pelumas pintu air.

Hasil wawancara tentang pemeliharaan rutin jaringan irigasi terhadap informan diperoleh hasil:

Salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Budiman, menyatakan:

“masyarakat di sekitar jaringan irigasi setiap satu bulan atau kurang dari sebulan melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik irigasi. Kegiatan tersebut berupa pembersihan sampah, memotong rumput, dan menutup kebocoran yang skalanya kecil. Namun jika kerusakannya terbilang parah, misalnya ada yang jebol, maka masyarakat tidak dapat membantu banyak, mengingat mereka melakukan bantuan menggunakan swadaya, sedangkan untuk kerusakan yang besar membutuhkan modal yang besar pula”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu warga atas nama Maliki yang menyatakan:

“kalo kerusakan kecilji, biasaji na atasi warga seperti membersihkan samapah sama menambal yang bocor tap kalo ada yang ambal tidak bisami kodong ka mahal pasti ongkosnya”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Salah satu warga atas nama Maryuni menambahkan:

“pernah ada salah satu bagiannya yang rusak tapi kecilji retak ji mungkin, jadi masyarakat bekerjasama ki untuk menambal yang rusak biar tidak jadi besar, ka yang rugi nantinya kita sendiri juga”. (Tanggal wawancara, 2 Agustus 2018).

Pemeliharaan dalam skala besar dilakukan dalam kurung waktu lebih dari 1 tahun yang biasa disebut dengan pemeliharaan perbaikan berkala. Pemeliharaan perbaikan berkala adalah kegiatan perbaikan pada jaringan irigasi yang biasanya dilaksanakan lebih dari 1 tahun, misalnya : 1) Mengecat pintu air dan mengganti skot balk yang lapuk ; 2) Menggali endapan lumpur; 3) Memperbaiki sayap bangunan dan tembok saluran; 4) Memperbaiki dan mengecat rumah bangunan

bagi; 5) Meninggikan tanggul saluran; 6) Memperbaiki bendung (sayap, pintu air dan lain-lain); 7) Mengganti pintu air yang rusak; 8) Memperbaiki kerusakan akibat bencana alam secara pemanen, setelah lebih dulu sudah dilaksanakan dengan perbaikan darurat.

Menurut Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone menjelaskan:

“untuk perbaikan skala besar biasanya dilakukan dalam kurung waktu yang agak lama mengingat perbaikan membutuhkan dana yang cukup besar. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat membantu sama sekali” (tanggal wawancara 3 Agustus 2018).

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Wahyuddin, menyatakan:

“perbaikan skala besar dilakukan untuk memperbaiki hal-hal seperti: Mengecat pintu air dan mengganti skot balk yang lapuk; 2) Menggali endapan lumpur; 3) Memperbaiki sayap bangunan dan tembok saluran; 4) Memperbaiki dan mengecat rumah bangunan bagi; 5) Meninggikan tanggul saluran; 6) Memperbaiki bendung (sayap, pintu air dan lain-lain); 7) Mengganti pintu air yang rusak;”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hasil wawancara yang telah dilakukan senada dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa: partisipasi masyarakat hanya terbatas pada perbaikan ringan saja misalnya membersihkan samapah dan membersihkan lumpur, sedangkan perbaikan dalam skala besar belum dapat dilakukan mengingat banyaknya jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan tidak sedikit. Partisipasi Tenaga yang belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan, baik itu dari proses operasi, pemeliharaan, maupun rehabilitasi jaringan irigasi. Seharusnya untuk dapat menjaga saluran irigasi tetap bersih dan terawat, diperlukan partisipasi para petani pemakai air

yang maksimal sehingga kelancaran dari air saluran irigasi dapat mengalir lancar tanpa hambatan dan kondisi badan saluran irigasinya tetap terjaga tanpa ada sedikit bagian-bagian yang rusak dan membutuhkan rehabilitasi, yang pastinya memerlukan biaya yang lebih mahal.

2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat kurang berminat dan berpartisipasi dalam upaya pengelolaan irigasi. Dalam proses pengelolaan jaringan irigasi, peranserta atau partisipasi masyarakat sangat penting untuk menunjang keberhasilannya. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi seperti dalam hal operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Dalam penelitian ini faktor yang menjadi penghambat dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi sanrego adalah faktor jenis kelamin dan umur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Faktor Jenis Kelamin

Jenis kelamin dalam penelitian ini maksudnya adalah biasanya petani yang berjenis kelamin laki-laki lebih aktif dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut buyung, salah satu warga di Kecamatan Kahu menyatakan:

“karena jumlah laki-laki di sini, lebih sedikit jadi yang terlibat dalam kegiatan perbaikan irigasi yah itu-itu saja ji dek. Kasian kalo perempuan disuruh menggergaji atau ma’palu-palu (memalu paku). Jadi kasian kalo capekmi dari sawah kadang tidak ikut kerja bakti”.

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Budiman, menyatakan:

“secara umum, masyarakat aktif cuman kekurangan tenaga. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah laki-laki tidak sebanding dengan banyaknya jumlah perempuan, jadi yang bisa kerja keras cuman sedikit”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu warga atas nama Maliki yang menyatakan:

“sedikitji laki-laki disini kak, jadi kalo ada perbaikan terpaksa digilir, meningat juga capek ki orang dari sawah. Kadang tongmi itu ada yang malas untuk datang”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Salah satu warga atas nama Maryuni menambahkan:

“maumi diapa dek, ka kebanyakan perempuan na laki-laki, jadi tidak bisa banyak membantu untuk perbaikannya irigasi”. (Tanggal wawancara, 2 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas, didukung oleh hasil pengamatan peneliti dimana jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Saat proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi terpaksa menggunakan sistem ganti-gantian yang kadang kala terdapat masyarakat yang malas untuk datang membantu.

b. Faktor Umur

Umur dalam penelitian ini dimaksudkan apabila para petani memiliki usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua dapat mempengaruhi partisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh hasil sebagai berikut:

Menurut buyung, salah satu warga di Kecamatan Kahu menyatakan:

“rata-rata warga yang tinggal di sini adalah orang tua, anak mudanya tidak ada yang mau jadi petani, kebanyakan kerja di kota ki jadi pegawai”.

Menambahkan pendapat di atas, salah satu pegawai di Dinas Pengelolaan

Sumber Daya Air Kabupaten Bone atas nama Budiman, menyatakan:

“karena faktor umur banyak warga yang sudah tidak kuat untuk ikut serta dalam kegiatan pengelolaan irigasi”. (tanggal wawancara 2 Agustus 2018).

Hal serupa disampaikan oleh salah satu warga atas nama Maliki yang menyatakan:

“orang tuaji yang banyak ikut ke kegiatan pembersihan irigasi, anak muda rata-rata kerjaki di luar kota atau kuliahki”. (tanggal wawancara 5 Agustus 2018).

Salah satu warga atas nama Maryuni menambahkan:

“orang tuaji dek banyak di sini, makanya kalo ada kegiatan kadang sedikit yang datang”. (Tanggal wawancara, 2 Agustus 2018).

Hasil wawancara di atas, didukung oleh hasil pengamatan peneliti dimana jumlah penduduk yang lebih tua lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih muda. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan jaringan irigasi Sanrego.

C. Pembahasan Penelitian

1. Bentuk partisipasi masyarakat

Istilah partisipasi mengandung arti keikutsertaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 679), partisipasi adalah “sejumlah orang yang turut berperan dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta”. Maksud partisipasi

di sini adalah keikutsertaan, peran serta, atau keterlibatan seseorang baik secara perorangan maupun sebagai kelompok dalam suatu kegiatan tertentu.

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta atau keikutsertaan dan keterlibatan seseorang secara perseorangan atau berkelompok dalam suatu kegiatan. Conyer (1984) menjelaskan bahwa pendekatan dalam partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan. Kerja sama dengan masyarakat, umumnya didefinisikan sebagai usaha para masyarakat untuk mendukung kegiatan pengelolaan jaringan irigasi dengan cara membantu memelihara dan memperbaiki jaringan irigasi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat adalah bentuk-bentuk partisipasi, keterlibatan, atau dukungannya sebagai anggota masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan jaringan irigasi khususnya jaringan irigasi Sanrego.

Dalam penelitian ini, bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi dua yakni:

a. Partisipasi Harta Benda

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, dimana pada saat terjadi kerusakan di sekitar lahan irigasi, maka masyarakat secara sukarela melakukan perbaikan yang sifatnya ringan, misalnya membersihkan pinggiran irigasi dan mencari lokasi penyumbatan jika debit air yang mengalir tidak sesuai dengan perkiraan. Jika dilihat dari keaktifan masyarakat dalam menyumbangkan harta benda mereka, maka dapat disimpulkan

bahwa partisipasi harta benda masyarakat terbilang aktif guna menjaga agar kondisi irigasi sanrego tetap baik.

Hasil penelitian ini, sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Vivi Herlina dengan judul “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir, Kabupaten Kerinci” (www.ejurnal.kopertis10.or.id/index. online: diakses tanggal 27 Agustus 2018). Hasil dari penelitiannya diperoleh salah satu tolak ukur keberhasilan pemerintah adalah terlaksananya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melihat gambaran pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari sumber pembiayaan pembangunan fisik. Adapun sumber dari pembiayaan pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci adalah dari pemerintah yaitu dari dana ADD dan selebihnya dari swadaya masyarakat itu sendiri.

Di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci bentuk dari partisipasinya adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi uang yaitu bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat dalam pembangunan fisik, adapun partisipasi yang diberikan adalah berupa uang yang diberikan oleh para pengusaha dan pegawai yang terdapat di Desa Pungut Hilir karena mereka tidak sempat untuk berpartisipasi dalam bentuk tenaga maupun ikut serta dalam pengambilan keputusan.

- 2) Partisipasi harta benda, sebagian masyarakat Desa Pungut Hilir juga menyumbangkan alat-alat kerja atau perkakas mereka untuk memperlancar pembangunan dan untuk lebih bisa memperoleh hasil yang sesuai keinginan dan maksud dari masyarakat itu sendiri.
- 3) Partisipasi buah pikiran diberikan pada saat musyawarah saat akan dilaksanakan proses perencanaan pembangunan.

Dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel, yaitu variabel Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. Indikator-indikator dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik adalah sebagai berikut:

- 1) Prakarsa/inisiatif, merupakan bentuk partisipasi untuk meningkatkan prakarsa masyarakat, menyarankan strategi pemberdayaan terus menerus, terarah dan terencana dari pemerintah untuk mendorong masyarakat agar partisipasi masyarakat di Desa Pungut Hillir dalam pembangunan dengan bentuk ide/pemikiran, maka dapat dilihat pada keikutsertaan dalam mengikuti rapat-rapat dan keaktifan dalam memberi pendapat dan saran dalam pertemuan.
- 2) Indikator Pembiayaan berarti meningkatkan pembiayaan masyarakat, strategi yang disarankan adalah mendorong masyarakat untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada pemerintah. Berdasarkan indikator kedua dapat diinterpretasikan bahwa pembiayaan baik berupa uang ataupun dari swadaya masyarakat menunjukkan suatu bentuk bagian partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan ataupun kesadaran masyarakat

bahwa dalam suatu pembangunan membutuhkan dana yang cukup, dan masyarakat dalam memberikan sumbangan bukan karena adanya paksaan dari pemerintah atau dari pihak lain tetapi karena adanya kesadaran untuk membangun daerahnya.

- 3) Indikator Pengambilan Keputusan yaitu pengambilan keputusan berarti meningkatkan pembuatan keputusan oleh masyarakat, strategi yang disarankan adalah memperkuat posisi modal sosial yang ada di masyarakat dan juga menekankan pada fasilitator untuk terus menerus mengingatkan masyarakat akan pentingnya peranan mereka dalam membuat keputusan. Berdasarkan hasil wawancara pada indikator ketiga tentang pengambilan keputusan dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat berhak untuk ikut dan terlibat dalam pembangunan terutama dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah bukan keputusan sendiri, serta adanya keterbukaan dan akuntabilitas antara pelaku pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan agar pembangunan yang diharapkan dapat berlangsung efektif dan efisien serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, dalam pengambilan keputusan seharusnya menggunakan kebijakan dalam pengambilan suatu keputusan dari musrenbang (musyawarah rencana pembangunan desa) antara aparatur desa dan masyarakat yang telah diterapkan sebelum pembangunan dilaksanakan.
- 4) Indikator mobilisasi tenaga berarti meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat

yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, menghidupkan kembali organisasi kemasyarakatan sebagai sarana untuk memobilisasi tenaga. Dari indikator keempat tersebut dapat diinterpretasikan antara teori yang menjadi dasar dengan hasil penelitian bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan bukanlah merupakan paksaan, akan tetapi kerelaan untuk terlibat. Kerelaan itu sendiri muncul dari kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam bentuk partisipasi tenaga itu adalah suatu upaya untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan yang diharapkan, serta dengan menetapkan sanksi yang adil kepada masyarakat yang tidak terlibat aktif dalam memobilisasi tenaga, agar untuk kedepannya masyarakat dapat merasa diri mereka sangatlah penting dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan kata lain partisipasi masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan disekitarnya.

- 5) Indikator pelaksanaan pembangunan yaitu pelaksanaan berarti bahwa masyarakat ikut serta melaksanakan langkah-langkah yang telah diambil dalam proses pembangunan untuk mencapai tujuan dengan memberikan pelatihan-pelatihan serta gambaran pelaksanaan pembangunan sejenis ditempat lain sebagai bahan referensi sehingga akan menjadi bahan perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan dan masyarakat dipandu dalam kegiatan pembangunan ini. Dari indikator kelima tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masyarakat tidak begitu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Pungut Hilir karena adanya

pembangunan yang belum dilaksanakan karena keterbatasan dana sementara pembangunan fisik yang benar-benar dibutuhkan tidak diperbaiki, seharusnya pembangunan diutamakan yang lebih diperlukan daripada yang tidak terlalu diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk partisipasi masyarakat berupa harta benda sangat membantu dalam upaya pengelolaan jaringan irigasi Sanrego. Peran serta masyarakat dalam partisipasi harta benda berupa peminjaman perkakas dan alat-alat secara swadaya dalam memelihara dan memperbaiki jaringan irigasi.

b. Partisipasi Tenaga

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Sesuai dengan ketentuan umum Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2006 tentang Irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya. Jaringan irigasi dapat cepat rusak karena adanya hujan/air, sengatan sinar dan panas matahari secara langsung, hewan/manusia, tanaman liar atau karena rancangan dan konstruksi fasilitas dan jaringan yang kurang baik.

Hasil wawancara yang telah dilakukan senada dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa: partisipasi masyarakat hanya terbatas pada perbaikan ringan saja misalnya membersihkan samapah dan membersihkan lumpur, sedangkan perbaikan dalam skala besar

belum dapat dilakukan mengingat banyaknya jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan tidak sedikit. Partisipasi Tenaga yang belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan, baik itu dari proses operasi, pemeliharaan, maupun rehabilitasi jaringan irigasi. Seharusnya untuk dapat menjaga saluran irigasi tetap bersih dan terawat, diperlukan partisipasi para petani pemakai air yang maksimal sehingga kelancaran dari air saluran irigasi dapat mengalir lancar tanpa hambatan dan kondisi badan saluran irigasinya tetap terjaga tanpa ada sedikit bagian-bagian yang rusak dan membutuhkan rehabilitasi, yang pastinya memerlukan biaya yang lebih mahal.

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo (www.media.neliti.com/media/publications. online: diakses tanggal 28 Agustus 2018) dengan judul “Penelitian Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3r (Reduce, Reuse Dan Recycle) (Studi Pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Hasil dari penelitian mereka adalah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan TPST Desa Mulyoagung dibedakan menjadi partisipasi masyarakat dalam bentuk uang/material dan dalam bentuk tenaga/jasa.

Dalam bentuk uang partisipasi masyarakat tidak besar, karena pembangunan TPST sebagian dana banyak diperoleh dari pemerintah sehingga semua pembangunan fisik TPST ditangani oleh pemerintah. bentuk tenaga/jasa sudah baik. Jenis partisipasi yang ada di Desa Mulyoagung jika merujuk pada pendapat Keith Davis yang dikutip oleh Sastropetro (1988, h.16), yaitu dalam

bentuk tenaga (physical participation) dimana partisipasi baik individu maupun kelompok dengan tenaga yang dimilikinya melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu. Hal ini dapat dilihat dari penyajian data fokus bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat juga ikut berpartisipasi baik berupa tenaga/jasa saat pembangunan berlangsung.

Bentuk partisipasi ini jika dikaitkan dengan pembangunan TPST, diwujudkan dalam bentuk sumbangan tenaga kerja yang diberikan oleh masyarakat, warga ikut berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desanya dengan menyumbangkan tenaga mereka. Partisipasi tenaga kerja yang ada di desa di dasari dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa mulyoagung bergotong royong dalam pembuatan jalan menuju TPST. Partisipasi masyarakat dalam memelihara dan memanfaatkan pembangunan TPST Dari hasil penelitian, partisipasi masyarakat Desa Mulyoagung dalam memelihara TPST sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kesukarelaan atau kesadaran masyarakat untuk membayar iuran guna membiayai operasional TPST agar tetap berjalan dengan baik. Karena TPST Desa Mulyoagung merupakan hasil swadaya dari masyarakat maka peran masyarakat dalam membayar iuran sangatlah penting agar TPST tetap bisa berjalan dan berkembang.

Seperti yang dikatan oleh Slamet (1994: 89), partisipasi di dalam pemanfaatan (utilitazion stage) yaitu pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun. Dalam memanfaatkan TPST juga sangat baik, selain

untuk mengelola sampah agar lingkungan menjadi bersih TPST juga dimanfaatkan untuk memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan yang ada yaitu mengajak atau mempekerjakan masyarakat Desa Mulyoagung yang tergolong ekonomi rendah untuk bekerja di TPST, Sehingga dapat mengurangi pengangguran yang ada di Desa Mulyoagung. TPST Mulyoagung Bersatu pada tahun 2013 sudah bisa mempekerjakan sebanyak 64 orang hal ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2010. Bahkan pekerja TPST tidak Cuma berasal dari Desa Mulyoagung sendiri, 11 diantaranya berasal dari desa lain. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R Pra pengelolaan Peran serta masyarakat sangat mendukung program pengelolaan sampah suatu wilayah. Peran serta masyarakat dalam bidang persampahan adalah proses dimana orang sebagai konsumen sekaligus produsen pelayanan persampahan dan sebagai warga mempengaruhi kualitas dan kelancaran prasarana yang tersedia untuk mereka.

Dalam pra pengelolaan sampah membutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan sampahnya sendiri. Pewadahan merupakan suatu cara penampungan sampah sementara baik di sumbernya, individual maupun komunal. Ada beberapa tujuan dilakukan pewadahan yaitu untuk memudahkan pengumpulan dan pengangkutan, mengatasi timbulnya bau busuk dan menghindari air hujan. Untuk menunjang keberhasilan operasi pengumpulan sampah, perlu adanya pewadahan yang sebaiknya dilakukan oleh sumber sampah. Pewadahan tersebut ditempatkan sedemikian rupa, sehingga memudahkan dan cepat bagi para petugas untuk mengambilnya secara teratur dan higienis. Dalam

Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Menurut Faizah (2008), dalam pengelolaan menuju zero waste, proses pemilahan dan pengolahan harus dilaksanakan di sumber sampah, baik bersamaan maupun secara berurutan dengan pewadahan sampah. Pengelolaan sampah diawali dari lokasi timbulan sampah atau produsen sampah. Sampah dipisah antara sampah organik dan sampah anorganik, dan ditempatkan pada wadah sampah yang berbeda. Sampah organik untuk diproses menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik biasanya dimanfaatkan untuk didaur ulang maupun dimanfaatkan kembali. Di Desa Mulyoagung partisipasi masyarakat dalam pewadahan sudah baik.

Dari hasil penelitian di Desa Mulyoagung setiap depan rumah masyarakat terdapat tempat sampah. Masyarakat wewadahi sampah-sampahnya pada kantong kresek dan dibuang pada tempat sampah depan rumahnya. Akan tetapi pewadahan sampah tidak disertai dengan pemilahan. Hal ini dikarenakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, selain itu keberadaan tempat sampah yang disediakan di setiap rumah di Desa Mulyoagung hanya disediakan satu tempat sampah, tempat sampah yang disediakan tidak dibedakan antara sampah basah dan sampah kering. Walaupun tanpa pemilahan, dengan ikut berpartisipasi dalam wewadahi sampahnya sendiri itu sudah baik. Sehingga sampah tidak berserakan, masyarakat juga mau membuang sampahnya di tempat sampah.

Proses pengelolaan Dalam proses pengelolaan sampah pada TPST Mulyoagung Bersatu masyarakat disini yaitu masyarakat yang tergabung dalam

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi pengurus TPST. Kepengurusan TPST terdiri dari ketua RT/RW dan Tokoh Setempat. Menurut Keith Davis sebagaimana yang dikutip Sastropoetro (1988: 16), jenis partisipasi masyarakat yang ada di Desa Mulyoagung dalam pengelolaan sampah, berupa tenaga (*physical participation*), yaitu partisipasi dari individu atau kelompok dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu. Hal ini Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) secara sukarela mengurus TPST dengan maksud agar tercipta lingkungan yang bersih. KSM juga melibatkan partisipasi masyarakat lain yaitu untuk bekerja menjadi pengangkut, pemilah dan pengomposan.

Masyarakat yang menjadi pekerja pada TPST ini merupakan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (*pemberdayaan*) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Paska pengelolaan Sama halnya dengan proses pengelolaan sampah, dalam hal pemasaran hasil dari TPST tidak melibatkan banyak masyarakat. Karena sudah ada tim divisi pemasaran dari pihak TPST yang tergabung dalam Kelompok Swadaya Masyarakat. Menurut Keith Davis sebagaimana yang dikutip Sastropoetro (1988: 16), jenis partisipasi masyarakat yang ada di Desa Mulyoagung dalam pengelolaan sampah, berupa tenaga (*physical participation*), yaitu partisipasi dari individu atau kelompok

dengan tenaga yang dimilikinya, melibatkan diri dalam suatu aktifitas dengan maksud tertentu. Dalam memanfaatkan hasil olahan dari TPST khususnya pupuk organik sudah baik. Karena pupuk organik diberikan secara gratis untuk masyarakat Desa Mulyoagung. Dengan adanya pemberian pupuk organik gratis diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi hasil pertanian maupun tanaman hias milik warga Desa Mulyoagung.

Dari kedua hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya partisipasi tenaga masyarakat dipengaruhi oleh seberapa besar motivasi yang terdapat dalam diri masyarakat. Jika masyarakat merasa bertanggung jawab terhadap pembangunan, maka diharapkan sumbangsih dan partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan pembangunan tersebut juga besar.

2. Faktor penghambat partisipasi masyarakat

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan masyarakat kurang berminat dan berpartisipasi dalam upaya pengelolaan irigasi. Dari hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut:

a. Faktor Jenis Kelamin

Hasil wawancara yang didukung oleh hasil pengamatan peneliti dimana jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Saat proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi terpaksa menggunakan sistem ganti-gantian yang kadang kala terdapat masyarakat yang malas untuk datang membantu.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rizki Nabila, Tri Yuniningsih dengan judul Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang (www.media.neliti.com/media/publications, online: diakses tanggal 11 Agustus 2018). Dari penelitian mereka diperoleh: terdapat 2 bentuk partisipasi menurut Midgley, yaitu Authentic Participation atau Partisipasi Otentik, dan Pseudo-Participation atau Partisipasi Semu. Terdapat 3 kriteria dalam partisipasi otentik yaitu sumbangsih warga terhadap program, keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan, dan penerimaan manfaat program secara merata. Apabila salah satu dari 3 kriteria tersebut tidak dapat terpenuhi, maka bentuk partisipasinya adalah PseudoParticipation atau partisipasi semu.

- 1) Sumbangsih atau bantuan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

Sumbangsih atau bantuan yang diberikan oleh masyarakat bisa berupa bantuan materi atau barang, tenaga, waktu, ide, saran, kritik dan masukan lainnya yang dapat terus mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri. Sumbangsih masyarakat Kelurahan Kandri terhadap pengembangan Desa Wisata Kandri yaitu pada saat kegiatan-kegiatan yang berlangsung seperti Nyadran Kali maupun Sesaji Rewanda, membantu dalam bentuk waktu dan tenaga pada saat memandu wisatawan yang datang ke Desa Wisata Kandri, serta membantu ide dan saran terkait dengan kegiatankegiatan yang ditawarkan dalam paket wisata Desa Wisata Kandri maupun terkait dengan masa depan Desa Wisata Kandri merupakan

kriteria bahwa sumbangsih dari masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri sudah terpenuhi.

2) Pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri

Pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kegiatan merupakan hal yang penting agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Peran dan bantuan masyarakat dalam proses ini diperlukan agar keputusan-keputusan yang diambil sesuai dengan keadaan dan kondisi masyarakat. Pengambilan keputusan merupakan hal yang penting agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar dengan tujuan dan sasaran. Pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri ini melibatkan peran masyarakat dan melalui rembug warga, pertemuan, musyawarah mufakat dan musrembang. Dari hasil pemikiran-pemikiran untuk mengambil keputusan maka akan didapati keputusan yang paling serius dan mendesak, lalu dijadikan prioritas untuk diselesaikan. Dalam hal ini masyarakat memiliki peran yang sama besar dengan pengurus POKDARWIS, karena dari pemikiran masyarakat inilah yang nantinya akan menghasilkan berbagai saran dan masukan untuk menjadi sebuah keputusan. Maka kriteria keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang sudah terpenuhi.

3) Penerimaan manfaat secara merata

Desa Wisata Kandri telah menjadi Desa Wisata yang lebih berkembang dibandingkan dengan Desa Wisata lainnya di Kota Semarang, masyarakat sudah merasakan manfaat dari adanya Desa Wisata Kandri ini. Banyak manfaat yang telah dirasakan oleh warga seperti meningkatnya kesejahteraan masyarakat

melalui kepariwisataan dengan berbagai jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dari seluruh warga Kelurahan Kandri hanya sebagian saja yang sudah merasakan manfaat secara nyata dan perekonomian pun sudah meningkat, warga tersebut yang telah berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Kandri dan membentuk kelompok dan usaha di bidang masing-masing seperti kuliner, sablon, kerajinan, dan sebagainya. Sedangkan warga yang tidak ikut berpartisipasi langsung dan tidak menjadi anggota kelompok swadaya masyarakat, maupun tidak memiliki usaha di bidang kepariwisataan memang sampai saat ini belum merasakan manfaat yang ditimbulkan dari pengembangan Desa Wisata Kandri ini. Dengan demikian indikator penerimaan manfaat dari pengembangan Desa Wisata Kandri secara merata pada masyarakat di Kelurahan Kandri belum terpenuhi. B. Tingkat Partisipasi Dalam penelitian ini menggunakan teori tingkat partisipasi dari Arnstein.

Menurut Arnstein terdapat 3 tingkatan partisipasi yaitu Citizen Power, Tokenism, dan Non-participation. Dalam penelitian ini 2 tingkat yang akan diteliti yaitu tingkat Citizen Power dan Tokenism.

- 1) Citizen Power Dalam citizen power terdapat tiga sub tingkatan yaitu yang terendah adalah partnership, delegated power dan citizen control. Tingkatan partnership berarti adanya kemitraan antara petugas yang berwenang dengan masyarakat dalam program pembangunan. Lalu tingkatan delegated power berarti pemerintah memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk mengurus sendiri beberapa keperluannya dalam suatu program pembangunan. Terakhir adalah tingkatan citizen control

berarti masyarakat diberikan wewenang secara mandiri untuk mengendalikan suatu program mulai dari perumusan, implementasi hingga evaluasinya. Tingkat terendah dari citizen power yaitu tangga partnership, bisa dikatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat sudah sampai pada tingkat partnership ini. POKDARWIS dan pemerintah sudah menjalin kemitraan dengan masyarakat. POKDARWIS Desa Wisata dan masyarakat menjalin kemitraan dengan membentuk asosiasi atau pokja (kelompok kerja) dan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) untuk mengajak masyarakat yang ingin mengembangkan diri dan berinovasi khususnya untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri. Sub tingkat kedua dari tingkat Citizen Power yaitu Delegated Power. Dalam sub tingkat delegated power ini bisa dikatakan bahwa derajat partisipasi masyarakat Kandri juga sudah sampai pada tingkat ini. Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masyarakat Kandri untuk mengurus kebutuhannya dalam pengembangan Desa Wisata Kandri, karena Desa Wisata ini terbentuk oleh masyarakatnya sendiri maka masyarakat sendiri juga lah yang tahu apa saja yang diperlukan dalam Desa Wisata ini. Pemerintah hanya melakukan pembinaan dan mengeluarkan kebijakan. Dalam sub tingkat citizen control ini maksudnya masyarakat mengendalikan kebijakan publik mulai dari perumusan, implementasi, hingga evaluasinya bisa dikatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Kandri dalam pengembangan Desa Wisata Kandri sudah berada pada tingkat citizen control ini. Dalam Desa Wisata ini

pengendali kebijakan yaitu POKDARWIS, namun POKDARWIS ini juga melibatkan masyarakat diluar pengurus untuk menjadi pengendali juga dalam kebijakan-kebijakan Desa Wisata Kandri.

- 2) Tokenism. Tokenisme merupakan tingkat dimana terjadinya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Tokenime dibagi lagi menjadi tiga tingkatan. Mulai dari tingkat information, consultation dan placation. Pertama yang merupakan tingkatan terendah dalam tingkat tokenism adalah information yang artinya terjadi komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi yang terjadi diharapkan mampu membantu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai pengembangan Desa Wisata Kandri. Komunikasi satu arah sudah dilakukan oleh pemerintah, seperti memberi pengumuman saat akan dilaksanakan pameran, pelatihan atau sosialisasi untuk warga Kandri, pengumuman tersebut disampaikan saat ada pertemuan rutin yang dilaksanakan di setiap RT atau RW di Kelurahan. Tidak hanya informasi lewat pengumuman, pemerintah juga telah membuat leaflet tentang Desa Wisata agar masyarakat lebih siap lagi menjadi masyarakat yang partisipatif dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Selanjutnya tingkatan kedua dalam tingkat tokenism adalah consultation yaitu adanya komunikasi dua arah, berupa pertemuanpertemuan dengan masyarakat untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertemuan ini yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap kegiatan yang mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri. Desa

Wisata Kandri Pertemuan satu bulan sekali dilaksanakan untuk pertemuan seluruh pengurus POKDARWIS, sedangkan pertemuan tiga bulan sekali dihadiri oleh pengurus POKDARWIS, RT, RW, Lurah, Camat, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, serta warga masyarakat Kelurahan Kandri untuk membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga membahas evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Tidak hanya pertemuan rutin saja, di Desa Wisata Kandri pernah dilaksanakan FGD (Forum Group Discussion) membahas perkembangan Desa Wisata Kandri dan membahas apa yang akan dilakukan mendatang. Tangga tertinggi pada tingkat tokenism adalah placation. Yang dimaksud dengan placation disini adalah melibatkan warga untuk menjadi anggota komite dalam program namun hak memutuskan tetap berada di tangan pemegang kekuasaan. Di Desa Wisata Kandri ini telah dibentuk komite-komite kecil untuk mendukung pengembangan Desa Wisata Kandri. Komite-komite yang telah dibentuk ini adalah pokja (kelompok kerja) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Pokja-pokja dan KSM yang telah terbentuk memiliki bidangnya masing-masing, dimulai dari bidang kuliner, batik, sablon, kerajinan tangan, pemandu wisata dan transportasi. Komite-komite kecil atau pokja yang telah dibentuk diberi kewenangan dalam proses pengambilan keputusan. Pokja-pokja selalu berperan dalam setiap pengambilan keputusan karena pokja tersebut yang tahu apa masalah yang terjadi dan mengerti apa yang harus diprioritaskan.

- 3) Faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri Kota Semarang.

Pada pengembangan Desa Wisata Kandri telah menemui beberapa kendala yang menjadi faktor partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Ada enam faktor yang mendorong maupun menghambat partisipasi masyarakat dalam suatu program yaitu pengetahuan masyarakat terhadap program, tingkat pendidikan masyarakat, jenis kelamin, kepercayaan terhadap budaya tertentu dan faktor eksternal yang berasal dari stakeholder.

Faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri adalah:

- a) Faktor Pekerjaan Masyarakat. Latar belakang pekerjaan masyarakat menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Walaupun mungkin saja memang ada beberapa yang karena latar belakang pekerjaan dan berbagai kesibukan jadi tidak memiliki waktu luang untuk berpartisipasi pada pengembangan Desa Wisata Kandri, dan pekerjaan masyarakat menjadi faktor penghambat.
- b) Faktor Pendidikan Melihat seberapa jauh latar belakang pendidikan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri, namun pada kenyataannya terlihat pada latar belakang pendidikan warga Kandri terbanyak yaitu lulusan SD. Dapat disimpulkan, bahwa

tingkat pendidikan menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

- c) Faktor Eksternal Faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (Stakeholder), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap pengembangan Desa Wisata Kandri. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau dalam hal ini pihak Pengurus POKDARWIS di Desa Wisata Kandri membawa pengaruh bagi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Petaruh kunci yang dimaksud disini juga bisa dimaksudkan sampai kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yang memegang peran penting dalam pengembangan Desa Wisata Kandri seperti pengawas dan pembina. Dan peran media masa dalam mempromosikan Desa Wisata Kandri dengan memanfaatkan kemajuan teknologi internet dengan membuat blog maupun web dan iklan. faktor eksternal yang menjadi penghambat yaitu dari Disbudpar ialah pelatihan yang monoton sehingga warga bosan mengikuti pelatihan tersebut, dan dari POKDARWIS dalam pengurus masih ada rasa individualisme yang tinggi dan masih memikirkan kepentingan pribadi, dan kurang mengayomi dalam mengajak warga untuk berpartisipasi, dan secara administratif belum berjalan dengan baik.

Faktor yang mendorong partisipasi masyarakat adalah:

- a) Pengetahuan terhadap program Pemahaman masyarakat bisa saja dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat itu sendiri. Kita akan melihat

adanya kecenderungan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan Desa Wisata Kandri dari seberapa jauh pengetahuan masyarakat mengenai Desa Wisata. Hampir seluruh masyarakat Kelurahan Kandri pada umumnya sudah mengetahui Desa Wisata dan paham bahwa Kandri sudah diangkat menjadi Desa Wisata di Kota Semarang. Pemahaman masyarakat akan pengembangan Desa Wisata Kandri pun dirasa sudah sangat baik.

- b) Jenis Kelamin Jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor dalam partisipasi masyarakat. Di wilayah Kandri sendiri jumlah warga berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada jumlah warga yang berjenis kelamin perempuan. Disini kita akan melihat seberapa jauh jenis kelamin ini mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Ada sektor yang memang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja seperti pemandu river tubing, pemandu river tubing semua dilakukan oleh laki-laki karena mengingat fisik laki-laki lebih kuat dan berani dibandingkan dengan perempuan, tetapi tetap banyak juga perempuan yang berpartisipasi tapi di sektor lain seperti kuliner atau batik. Faktor jenis kelamin menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri, karena perempuan dan laki-laki memiliki porsinya masing-masing dalam berpartisipasi.
- c) Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Kepercayaan terhadap budaya tertentu merupakan faktor yang mungkin mempengaruhi karena

masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan partisipasi masyarakat. Di Desa Wisata Kandri sendiri memang sangat mengunggulkan budaya, dalam salah satu kegiatannya yaitu “Nyadran Kali” untuk menghormati para leluhur. Kepercayaan atau budaya tertentu yang berkembang di masyarakat memang beragam, diantaranya yaitu adanya keyakinan yang bertentangan dengan budaya-budaya terdahulu yang menyangkut dengan ritual tertentu. Desa Wisata Kandri tidak hanya menawarkan wisata alam dan edukasi, namun juga terdapat wisata budaya yang bisa dibilang kental, dahulu memang ada beberapa masyarakat yang enggan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan Desa Wisata Kandri apalagi kegiatan yang berbau budaya karena bertolak belakang dengan kepercayaan, namun seiring berjalannya waktu masyarakat yang menentang bisa mengerti bahwa ini merupakan kebutuhan kepariwisataan dengan menjual budaya-budaya yang ada dan kegiatan kebudayaan tersebut tetap berjalan. Faktor kepercayaan terhadap budaya tertentu menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Kandri.

- d) Faktor Eksternal Dalam pengembangan Desa Wisata Kandri. Faktor pendorong partisipasi masyarakat yang paling signifikan adalah dari POKDARWIS dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang yaitu adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh Disbudpar, Pokdarwis

telah memberi kesempatan masyarakat untuk menjadi anggota pokja, Disbudpar telah memberikan kebijakan, dan memberi pembinaan.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian di atas, terletak pada faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat. Jika dalam penelitian ini jenis kelamin dan umur masuk ke dalam faktor penghambat sedangkan pada jurnal penelitian di atas, jenis kelamin dan umur masuk kedalam faktor pendukung. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang dari masing-masing peneliti dan tujuan dari penelitian masing-masing.

b. Faktor Umur

Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati. Semisal, umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Oleh yang demikian, umur itu diukur dari tarikh ianya lahir sehingga tarikh semasa(masa kini). Manakala usia pula diukur dari tarikh kejadian itu bermula sehinggalah tarikh semasa (masa kini). Umur dalam penelitian ini dimaksudkan apabila para petani memiliki usia yang terlalu muda ataupun terlalu tua dapat mempengaruhi partisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil pengamatan peneliti dimana jumlah penduduk yang lebih tua lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih muda. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan jaringan irigasi Sanrego.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk partisipasi petani
 - a. Partisipasi Harta Benda. Jika dilihat dari keaktifan masyarakat dalam menyumbangkan harta benda mereka, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi harta benda masyarakat terbilang aktif guna menjaga agar kondisi irigasi sanrego tetap baik.
 - b. Partisipasi Tenaga. Partisipasi masyarakat hanya terbatas pada perbaikan ringan saja misalnya membersihkan sampah dan membersihkan lumpur, sedangkan perbaikan dalam skala besar belum dapat dilakukan mengingat banyaknya jumlah dana yang dibutuhkan untuk perbaikan tidak sedikit. Partisipasi Tenaga yang belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan, baik itu dari proses operasi, pemeliharaan, maupun rehabilitasi jaringan irigasi. Seharusnya untuk dapat menjaga saluran irigasi tetap bersih dan terawat, diperlukan partisipasi para petani pemakai air yang maksimal sehingga kelancaran dari air saluran irigasi dapat mengalir lancar tanpa hambatan dan kondisi badan saluran irigasinya tetap terjaga tanpa ada sedikit bagian-

bagian yang rusak dan membutuhkan rehabilitasi, yang pastinya memerlukan biaya yang lebih mahal.

2. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

- a. Faktor jenis kelamin. Jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan. Saat proses pemeliharaan dan perbaikan jaringan irigasi terpaksa menggunakan sistem ganti-gantian yang kadang kala terdapat masyarakat yang malas untuk datang membantu.
- b. Faktor umur. Jumlah penduduk yang lebih tua lebih banyak dibandingkan dengan yang lebih muda. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan jaringan irigasi Sanrego.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebagai berikut:

1. Bagi para masyarakat

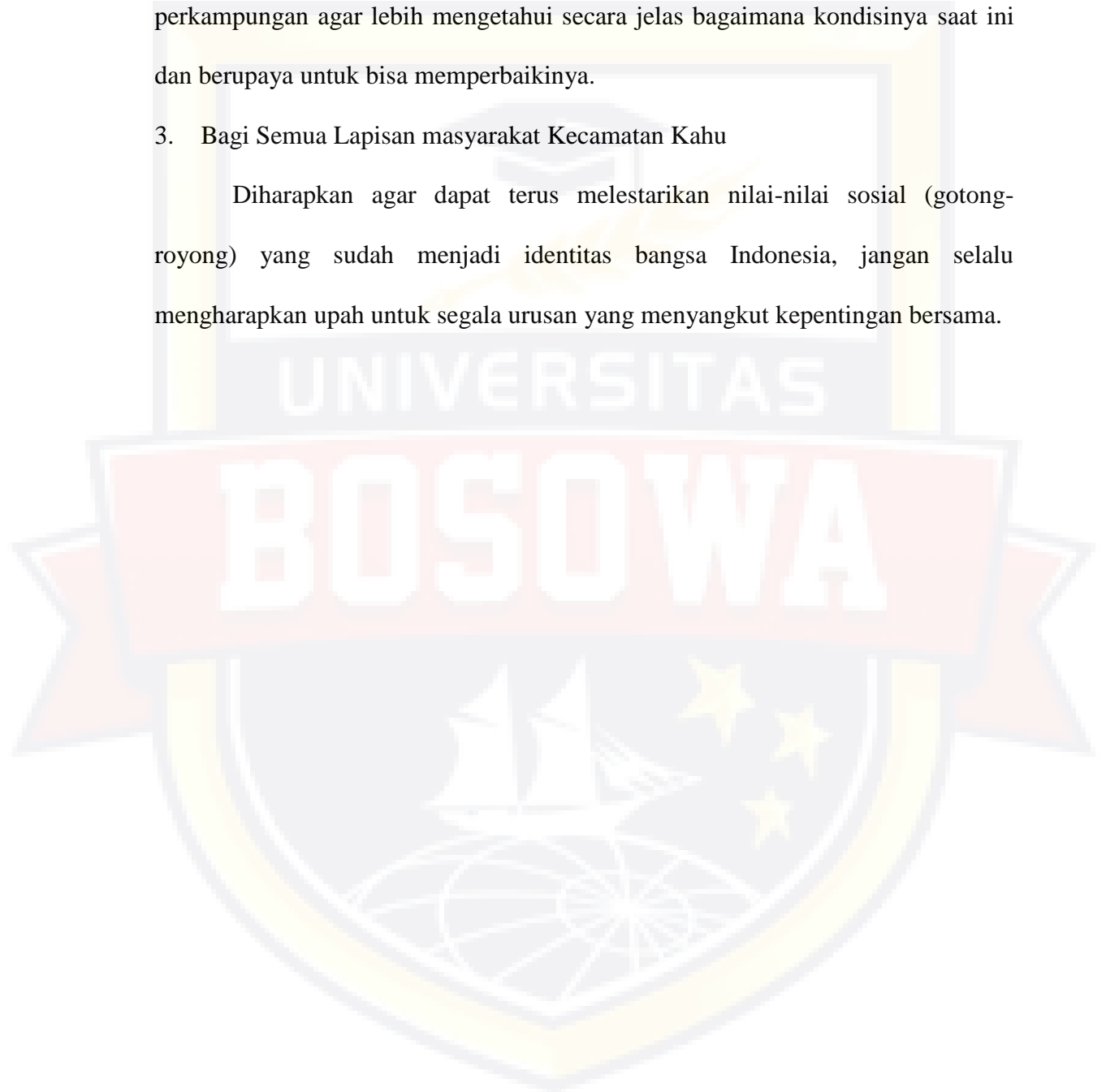
Diharapkan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal, karena dengan memiliki kondisi jaringan irigasi saat ini sawah dari musim kemusim semakin berkurang.

2. Bagi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone

Diharapkan bisa sering turun lapangan melihat kondisi jaringan irigasi di perkampungan agar lebih mengetahui secara jelas bagaimana kondisinya saat ini dan berupaya untuk bisa memperbaikinya.

3. Bagi Semua Lapisan masyarakat Kecamatan Kahu

Diharapkan agar dapat terus melestarikan nilai-nilai sosial (gotong-royong) yang sudah menjadi identitas bangsa Indonesia, jangan selalu mengharapkan upah untuk segala urusan yang menyangkut kepentingan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. 2009. *Pengelolaan Sumber Daya Air*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum.
- Adi, I. R., 2001. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ari H Gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Cohen & Uphoff, 1977. *Rural Development Participation*. New York: Cornell University.
- Conyers, D and Hill. 1984. *Konsep Perencanaan Pembangunan*. Bandung: Yrama Widya.
- Direktorat Irigasi dan Rawa Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 2006. *Pedoman Operasi Irigasi*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum.
- Ginting N, 2014, *Manajemen Pemasaran*. Bandung : Yrama Widya
- Hassan Shadil. 1993., *Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Holil, Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Garasi.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mansyur Ramly. 1986. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.
- Mawardi & Hidayati, Nur. 2007. *IAD-ISD-IBD*. Bandung =: CV. Pustaka Setia.
- Mikkelsen, B., 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Moeljatno, 1987, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T., 1987. *Pembangunan Masyarakat, Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Oakley, P., 1991. *Project With People, The Practice Of Participation in Rural Development*. Geneva: International Labour Office.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20. 2006 *Tentang Irigasi*. Jakarta.
- Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. NewYork: Harper & Row Publishers.
- Slamet, 1994, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*,. Surakarta:UNS Press.
- Sumarto dan Hetifa Sj. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*. Bandung: Yayasan. Obor Indonesia
- Soenarno. 2004. *Tiga Program Pokok Untuk Ketahanan Pangan*. Jakarta: Media Informasi Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Reflika Aditama.
- Suryono, Agus. 2003. *Paradigma, model pendekatan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah*. Malang: malang lembaga penerbit.
- Tjokromidjojo, B., 1976. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Tjokrowinoto, M., 1987. *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 . 2004. *Tentang Sumber Daya Air*. Jakarta.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Online

www.digilib.unila.ac.id/31568. diakses tanggal 17 Agustus 2018.

www.ejournal.kopertis10.or.id. Diakses tanggal 11 Agustus 2018

www.media.neliti.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2018



The image features a large, semi-transparent watermark of the Universitas Bosowa logo in the background. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow border. At the top is a graduation cap. Below it is a blue banner with the text 'UNIVERSITAS' and 'UNIVERSITAS' in white. A red banner across the middle contains the word 'BOSOWA' in white. The bottom part of the shield depicts a blue scene with two white sailboats on a globe, three yellow stars, and a white geometric pattern.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data



UNIVERSITAS BOSOWA PROGRAM PASCASARJANA

Jl Unp Sumoharjo Km 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website <http://www.univ45.ac.id> E-mail: pascasarjana_empatima@yahoo.com
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 17 Juli 2018

No. : **44 /B.03/PPs/Unibos/VII/2018**
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air UPT PSDA Wilayah Sanrego

di
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Sepuluh** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **Mappaseling**
NIM : **4616103029**
Program Studi : **Magister Administrasi Publik**
Konsentrasi Studi : **Administrasi Publik**
Judul Tesis : **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas maka Kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa tersebut di atas untuk melakukan penelitian.

Mahasiswa tersebut di atas dibimbing oleh:

1. Prof. Dr. Husain Hamka, M.S
2. Dr. Udin B.Sore, S.H., M.Si

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
u.b. Asisten Direktur,



Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si
NIDN 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Pertiinggal

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian dari Instansi



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
UPT PSDA WILAYAH SANREGO

Alamat : Jalan A. Page No. Telp. Palattae Kecamatan Kahu Pos. 92767

SURAT KETERANGAN

Nomor : 35 / UM / SRG / IX / 2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPT PSDA Wilayah Sanrego menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Saudara :

Nama : **MAPPASELING**
NIM : 4616103029
Universitas : **BOSOWA**
Program Studi : **Administrasi Publik**
Keterangan : **Telah melaksanakan penelitian**

Mahasiswa tersebut benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian di kantor UPT PSDA Wilayah Sanrego pada tanggal 7 April dengan judul penelitian:

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IRIGASI SANREGO
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Palattae, 17 September 2018

Kepala UPT PSDA

Wilayah Sanrego



Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Judul Tesis:

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN IRIGASI SANREGO KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONA

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi Sanrego

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi?
2. Seberapa besar pengaruh Partisipasi masyarakat tersebut terhadap pengelolaan Irigasi?

B. Faktor-Faktor Penghambat

1. Adakah Faktor-faktor Penghambat dalam Pembangunan Irigasi?
2. Apa Saja faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam membangun irigasi?

Lampiran 4. Foto-Foto Penelitian



Gambar 1: Program Cetak sawah Kementerian Pertanian di Sanrego Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.



Gambar 3 : Wagub SulSel Kunjungan Kerja Irigasi Sanrego Kabupaten Bone Sulawesi Selatan



Gambar 4 : Babinsa Koramil 02 bersama Kodim 1407 Kodam 14 Hasanuddin

